



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan bimbingan dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar dapat terselesaikan dengan baik dan lengkap. Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sebagai upaya melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam laporan ini, disajikan pencapaian sasaran kinerja dalam kurun waktu 1 Januari 2022 - 31 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2022 dengan fokus pada program-program prioritas. Selain itu, penyusunan laporan ini juga dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKPAD Kabupaten Banjar Tahun 2022 dan merupakan bagian dari evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang.

Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat bagi daerah Kabupaten Banjar khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dalam rangka untuk menyelaraskan visi Kepala Daerah yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis**”, dengan

tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dalam menyelenggarakan program dan kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis serta berkesinambungan. Selain itu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah juga mengemban misi ke-4 yaitu “ **Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif**”, serta meningkatkan fasilitasi penyaluran bantuan keuangan dan sosial pada masyarakat dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan azas profesionalisme dan standar pelayanan prima.

Martapura, 02 Januari 2023
Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar

Drs. ACHMAD ZULYADAINI, M. Si.
NIP. 19660104 198602 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP BPKPAD Kabupaten Banjar tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BPKPAD Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti – bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra BPKPAD Kabupaten Banjar 2021 – 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPAD menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2022 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang transparan, tertib, akuntabel dan profesional serta dalam rangka mewujudkan misi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif melalui Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai dengan prosedur dan perundang - undangan yang berlaku, selanjutnya Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan ikhtisar dari beberapa hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi BPKPAD. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja atas sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilaikualitas kinerja tata kelola keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKAD diukur melalui 4 (empat) dimensi meliputi: 1. Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik; 2. Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang	$IPKAD = (a + b + c + d) : 4$ <i>Keterangan :</i> <i>a = Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik</i> <i>b = Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak</i> <i>c = Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik</i> <i>d = Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Nilai IPKAD	ESSELON II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
			baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak; 3. Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik; dan 4. Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.	<i>yang baik dan tertib</i>			
2	Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD.	Perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya; Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan	$\frac{\text{realisasi tahun } n - \text{realisasi tahun } n-1}{\text{realisasi tahun } n-1} \times 100 \%$	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RPJMD	ESSELON II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
			peraturan perundang-undangan; PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.				

Sumber : Surat Keputusan IKU BPKPAD TA. 2022

Dari ilustrasi tabel di atas dapat dijelaskan untuk sasaran strategis (1) Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) dan target 93,09 % . Berdasarkan hasil penilaian Tim Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah didapat nilai indeks 95,29 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik. Untuk Sasaran strategis (2) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target meningkat 4 persen dari tahun sebelumnya. Persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 92.82%.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan persentase peningkatan PAD perlu dilakukan perumusan kategori tingkat pencapaiannya. Pada tabel berikut dibuat beberapa kategori tingkat keberhasilan, sebagai berikut :

Kategori Capaian	Uraian	Keterangan
A	apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 110%;	Sangat Baik
B	apabila 90% < rata2 capaian kinerja < 110%;	Baik
C	apabila 60% < rata2 capaian kinerja < 90%;	Cukup
D	apabila 40% < rata2 capaian kinerja < 60%	Kurang
E	apabila rata2 capaian kinerja < 40%	Buruk

Sumber Data: Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021

Berdasarkan kategori keberhasilan tabel diatas, bahwa capaian PAD dengan persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 92.82%. Nilai ini masuk dalam kategori “B” yaitu “Baik” .

Berdasarkan hasil rekapitulasi target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 dan 2022 data sampai dengan 31 Desember 2022, Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah -5,78%, dengan rincian sebagai berikut:

	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Peningkatan (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	217.727.181.400	221.010.477.564	205.146.282.499	-5,78 %
Pajak Daerah	80.995.317.631	82.661.526.690	93.727.655.167	15,72 %
Retribusi Daerah	5.921.606.520	6.548.731.174	6.598.693.934	11,43 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.596.447.089	11.480.574.630	716.777.0066	28,08 %
Lain-Lain PAD Yang Sah	125.213.810.160	120.319.645.070	97.652.163.332	-22,01 %

Dari ke empat komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut, hanya 2 komponen yang berada dalam wewenang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 93.727.655.167,- dari target Rp.82.661.526.690,- dengan peningkatan 15,72%. Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 6.598.693.934,- dari target Rp.6.548.731.174,- dengan peningkatan 11,43%.

Capaian peningkatan tersebut diatas target yang hanya 4%. Tetapi secara total peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai -5,78%, karena salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lain mengalami penurunan pendapatan, yaitu pada komponen Lain-Lain PAD yang Sah. Lain-Lain PAD yang Sah yang kewenangan tidak berada dibawah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sehingga terdapat kesulitan pada intervensi dan koordinasi untuk meningkatkan PAD. Berdasarkan hasil tersebut, komponen Lain-Lain PAD yang Sah sangat mempengaruhi capaian PAD dan nilai peningkatan PAD maka pada tahun 2023 akan dilaksanakan koordinasi dan intervensi secara lebih massif dan konfhrensif agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar dapat tercapai dengan maksimal.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa

Giro, Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan Dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Pendapatan Denda Pelanggaran Peraturan Daerah, Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP, dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Tantangan keberhasilan akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat dan keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi.

Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan BPKPAD Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi BPKPAD dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Total pagu yang tersedia sebesar Rp. 274.127.096.288,- dengan realisasi keuangan s.d 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.262.978.552.138,- atau 95,93%. Dengan rincian realisasi keuangan pada progam utama sebesar Rp.224.513.835.755,- dari total pagu sebesar Rp.228.620.092.627,- yaitu mencapai 98,20%. Sedangkan realisasi keuangan pada program pendukung sebesar Rp.38.464.716.383,- dari total pagu sebesar Rp. 45.507.003.661,- yaitu mencapai 84,52%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	2
C. Identifikasi Permasalahan	29
D. Isu Strategis	32
E. Sistematika Penyajian	34
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	35
A. Indikator Kinerja Utama	35
B. Perjanjian Kinerja	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	58
B. Capaian Kinerja Organisasi	58
C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran	166
D. Realisasi Anggaran	204
E. Analisis Efesiensi	226
F. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2021	246
BAB IV PENUTUP	252
A. Kesimpulan	252
B. Saran - Saran	254

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Pejabat Struktural BPKPAD	5
Tabel 1.2	Jumlah PNS BPKPAD	5
Tabel 1.3	Permasalahan BPKPAD	29
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	37
Tabel 2.2	Penerapan Kinerja Tahun 2022	41
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	59
Tabel 3.2	Hasil Monitoring Target Jangka Menengah	60
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Tahun 2022	84
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2022 ..	106
Tabel 3.5	Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja	141
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Tahun 2022	167
Tabel 3.7	Realisasi Indikator BPKPAD Tahun 2022	168
Tabel 3.8	Pagu Realisasi Anggaran Triwulan I	197
Tabel 3.9	Pagu Realisasi Anggaran Triwulan II	199
Tabel 3.10	Pagu Realisasi Anggaran Triwulan III	201
Tabel 3.11	Pagu Realisasi Anggaran Triwulan IV	203
Tabel.3.12	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	207
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	228

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi BPKPAD 29

Grafik Realisasi Kinerja Tahun 2021 78

Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja 2021 101

Gambar 3.3 Grafik Renstra BPKPAD Kab. Banjar 2021–2026 102

Gambar 3.4 Grafik Realisasi Kinerja Tahun 2021 & Target Periode Akhir
Renstra 125

Gambar 3.5 Grafik Komposisi Belanja BPKPAD 164

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia.

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

Dengan disusunnya laporan kinerja instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
2. Mendorong Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 tahun.
5. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
6. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas
7. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A. 2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah kepada Bupati.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintah Bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai Pajak Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 13 Tahun

- 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
- m. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Kerja.

B.1 KEDUDUKAN :

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar merupakan unsur penunjang urusan pemerintah bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 TUGAS :

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

B.3 FUNGSI :

B.3.1 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

B.3.1.1 Kondisi riil pegawai berdasar jabatan

a. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar Eselon III terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, sedangkan eselon IV terdiri dari 10 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di BPKPAD Kabupaten Banjar. Jumlah pejabat struktural di BPKPAD Kabupaten Banjar dijelaskan pada gambar 1 berikut :

Tabel 1.1 Keadaan Pejabat Struktural BPKPAD Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Eselon II/b	1	–	1
2	Eselon III/a	1	–	1
3	Eselon III/b	4	2	6
4	Eselon IV/a	10	11	21
Jumlah		16	13	29

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	IV/c	1
2	IV/b	2
3	IV/a	7
4	III/d	15
5	III/c	13
6	III/b	5
7	III/a	18
8	II/d	3
9	II/c	5
10	II/b	–
11	II/a	–
Jumlah		69

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Banjar

Berdasarkan gambar tabel diatas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki

pangkat/golongan III sebanyak 51 orang, pangkat/golongan IV sebanyak 10 orang, pangkat/golongan II sebanyak 8 orang, realita tersebut menunjukkan bahwa kalau ditinjau dari segi kepangkatan/golongan menunjukkan bahwa BPKPAD telah memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang memiliki pangkat/golongan III dan IV mencapai 61 orang atau 88% dari total pegawai yang dimiliki BPKPAD pada tahun 2022.

B.3.1.2 Kondisi riil pegawai berdasarkan pendidikan

Kebutuhan pegawai untuk tiap jenis jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada posisi jabatan struktural kebutuhan sebanyak 29 jabatan pada tahun 2022 , jumlah jabatan tersebut telah dapat terisi sepenuhnya dengan baik, baik pada posisi jabatan eselon II, eselon III dan eselon IV.
2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Umum BPKPAD diasumsikan setiap eselon IV pada masing-masing bidang minimal memiliki staf sebanyak 2 orang dan setiap eselon IV pada sekretariat memiliki 3 orang staf, maka pegawai fungsional umum yang diperlukan adalah sebanyak 63 orang. Namun pada saat ini BPKPAD hanya memiliki sebanyak 38 orang tenaga fungsional umum, dengan demikian BPKPAD masih membutuhkan sebanyak 25 orang tenaga fungsional umum untuk menunjang jalannya kegiatan di BPKPAD.

B.3.1.3 Tenaga kontrak waktu tertentu

Selain pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPKPAD di dukung oleh tenaga kontrak waktu tertentu, tercatat sebanyak 63 orang, dengan rincian 4 orang petugas kebersihan, 2 orang petugas keamanan, 1 orang sopir dan 56 orang tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung

berjalannya tugas sehari-hari pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar memiliki Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang, urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

- Adapun Rincian Uraian Tugas Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar adalah :
 - a. merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. menyelenggarakan kegiatan bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Badan;
 - e. mengawasi dan mengendalikan bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - g. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - h. menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 - i. membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Badan;

- j. merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta tugas-tugas pembantuan lainnya;
- k. membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- l. melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

Unsur-unsur Organisasi Badan terdiri dari :

a. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan Aset di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut :

- a. penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; (kata penyusunan untuk fungsi, kalau uraian menyusun)
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;

- f. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (aset);
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Badan;
 - h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan Barang Milik Daerah (aset);
 - i. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
 - j. menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja Badan serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Badan;
 - k. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
 - l. membuat Daftar Urut Kenaikan (DUK), penjaminan kenaikan pangkat pegawai, penjaminan kenaikan gaji berkala, penjaminan cuti, absensi pegawai;
 - m. melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Badan;
 - n. menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, sebagai berikut :
- a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Badan beserta dokumen penunjangnya;
 - d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - e. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Badan;
 - f. menyusun Profil Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Badan;

- g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - h. menyusun laporan program dan kegiatan Badan secara berkala berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Badan;
 - i. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Badan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, sebagai berikut :
- a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, aset dan akuntansi keuangan Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
 - d. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

b. Bidang Anggaran;

Bidang Anggaran mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan program perencanaan, penyusunan dan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan perencanaan, penyusunan dan analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. pengkoordinasian kegiatan penyusunan KUA/PPAS, KUPA/PPAS, verifikasi RKA-SKPD, RKAP-SKPD, DPA-SKPD, DPPA-SKPD, penyusunan peraturan daerah APBD/perubahan APBD, peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD serta regulasi kebijakan APBD;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan, penyusunan dan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Anggaran, sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. melaksanakan persiapan petunjuk teknis penyusunan APBD, KUA/PPAS, KUPA/PPAS perubahan;
- d. melaksanakan verifikasi RBA/RKA-SKPD dan PPKD, RBAP/RKAP-SKPD dan PPKD;
- e. melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. mendokumentasikan hasil perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran, sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan rancangan peraturan daerah APBD dan Perubahan APBD;
- e. melaksanakan verifikasi dan pembahasan RBA/RKA-SKPD dan PPKD, RBA/RKAP-SKPD dan PPKD Bersama TAPD;
- f. menyiapkan bahan Penyusunan Nota Keuangan APBD, Perubahan APBD, rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan perubahan penjabaran APBD;
- g. menyiapkan dan memfasilitasi kerjasama dengan instansi/bidang terkait penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- h. menyiapkan dan memfasilitasi kerjasama dengan instansi/bidang terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- i. menyiapkan dan memfasilitasi terkait dengan penyempurnaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD;
- j. melaksanakan koordinasi terkait dengan persetujuan dan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD, BLUD dan PPKD;
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- l. mendokumentasikan hasil penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- m. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

3. Sub Bidang Analisis Kebijakan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Uraian tugas Sub Bidang Analisis Kebijakan, sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan penyusunan regulasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. mendokumentasikan hasil penyusunan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Penyusunan analisis kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

.c. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai;

- c. pengkoordinasian kegiatan register Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan/register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) perangkat daerah, penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK), pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga, (TFK); dan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pengelolaan belanja daerah, pengendalian anggaran dan belanja pegawai; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan belanja daerah;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pengelolaan belanja daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja daerah;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan belanja daerah;
- d. melaksanakan penatausahaan belanja daerah dan pemindah bukuan kas daerah;
- e. melaksanakan register Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas belanja perangkat daerah, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan daftar pengantar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- g. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja daerah;
- h. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;

- i. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - j. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pengelolaan belanja daerah;
 - k. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan pengelolaan belanja daerah;
 - l. mendokumentasikan hasil pengelolaan belanja daerah;
 - m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan belanja daerah;
 - n. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan belanja daerah; dan
 - o. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengendalian anggaran;

Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian Anggaran, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pengendalian anggaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian anggaran;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian anggaran;
- d. melaksanakan pengelolaan dana transfer dan penatausahaan pembiayaan daerah;
- e. melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- f. melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah
- g. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan pengendalian anggaran;
- h. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan pengendalian anggaran;
- i. mendokumentasikan hasil penyusunan pengendalian anggaran;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengendalian anggaran;
- k. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian anggaran;

l. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

3. Sub Bidang Belanja Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi belanja pegawai.

Uraian tugas Sub Bidang Belanja Pegawai, sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan belanja pegawai;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis belanja pegawai;

c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan belanja pegawai;

d. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Gaji dan Non Gaji

e. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) serta melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

f. melaporkanrealisasi belanja Gaji dan Tunjangan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia

g. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan belanja pegawai;

h. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan belanja pegawai;

i. mendokumentasikan hasil penyusunan belanja pegawai;

j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait belanja pegawai;

k. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

l. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan belanja pegawai; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

.d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan akuntansi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja, program dan anggaran dari akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan tanggapan/tindaklanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP-BPKRI) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan bulanan, triwulanan, semesteran, pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuaitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan - LO dan beban, pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan perangkat daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pelaporan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi akuntansi pendapatan;

Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan akuntansi pendapatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi pendapatan;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan akuntansi pendapatan;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan akuntansi pendapatan;
- e. menyusun tanggapan/tindaklanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- f. menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - g. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan penyusunan akuntansi pendapatan;
 - h. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan akuntansi pendapatan;
 - i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Penyusunan akuntansi pendapatan;
 - j. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan akuntansi pendapatan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi akuntansi belanja dan pembiayaan.

Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan akuntansi belanja dan pembiayaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi belanja dan pembiayaan;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan akuntansi belanja dan pembiayaan;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan akuntansi belanja dan pembiayaan;
- e. melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan - lo dan beban
- f. mengkoordinasikan, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
- g. membina akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan kabupaten banjar
- h. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan penyusunan akuntansi belanja dan pembiayaan;
- i. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan akuntansi belanja dan pembiayaan;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Penyusunan akuntansi belanja dan pembiayaan;
- k. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar

mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- l. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan akuntansi belanja dan pembiayaan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi evaluasi dan pelaporan;

Uraian tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- f. melaksanakan konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
- g. membina Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten/Kota
- h. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan evaluasi dan pelaporan;
- i. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait evaluasi dan pelaporan;
- k. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

.e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan program perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- c. pengkoordinasian kegiatan urusan perencanaan, dan pemanfaatan BMD, pengamanan, penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- b. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan perencanaan dan pemanfaatan BMD;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan BMD;
- d. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan BMD;
- e. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan perencanaan dan pemanfaatan BMD;
- f. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
- g. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah

- h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah
 - i. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan perencanaan dan pemanfaatan BMD;
 - j. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan BMD;
 - k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait perencanaan dan pemanfaatan BMD;
 - l. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan BMD;
 - m. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;
2. Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengamanan dan penghapusan barang milik daerah;

Uraian tugas Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pengamanan dan penghapusan BMD;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan dan penghapusan BMD;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan dan penghapusan BMD;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan pengamanan dan penghapusan BMD;
- e. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah
- f. meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah
- g. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah
- h. menyiapkan dan memfasilitasi Kerjasama dengan instansi/bidang terkait dengan pengamanan dan penghapusan BMD;
- i. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan pengamanan dan penghapusan BMD;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengamanan dan penghapusan BMD;

- k. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan penghapusan BMD;
 - l. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penatausahaan barang milik daerah;

Uraian Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan penatausahaan BMD;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan BMD;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penatausahaan BMD;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan BMD;
- e. melakukan inventarisasi terhadap BMD
- f. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat
- g. menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- h. menghimpun laporan persediaan barang milik daerah perangkat daerah;
- i. menyusun penetapan pejabat yang mengelola barang milik daerah
- j. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan penatausahaan BMD;
- k. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan penatausahaan BMD;
- l. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penatausahaan BMD;
- m. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan BMD;
- n. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

.f. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan program pelayanan, pendataan, pendaftaran, validasi, penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan pelayanan, pendataan, pendaftaran, validasi, penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- c. pengkoordinasian kegiatan urusan pelayanan, pendataan, pendaftaran, validasi, penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pelayanan, pendataan, pendaftaran, validasi, penilaian dan penetapan objek pendapatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pelayanan pendapatan;

Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Pendapatan, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pelayanan pendapatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendapatan;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendapatan;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan pelayanan pendapatan;
- e. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan pelayanan pendapatan;
- f. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan pelayanan pendapatan;
- g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan pendapatan;
- h. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pendapatan;
- i. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani

prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

2. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Validasi, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;

Uraian tugas Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Validasi, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - e. melaksanakan urusan pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), serta penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan
 - f. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - g. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - i. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan validasi objek pendapatan;
 - j. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Objek Pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penilaian dan penetapan objek pendapatan;

Uraian tugas Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Objek Pendapatan, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan penilaian dan penetapan objek pendapatan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- e. mengkoordinasikan perumusan rencana pendapatan daerah dan evaluasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- f. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- g. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- i. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan penetapan objek pendapatan;
- j. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

.g. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan program perencanaan, pengembangan, penagihan, pemeriksaan, keberatan serta pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan perencanaan, pengembangan, penagihan, pemeriksaan, keberatan serta pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah;
- c. pengkoordinasian kegiatan urusan perencanaan, pengembangan, penagihan, pemeriksaan, keberatan serta pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan, pengembangan, penagihan, pemeriksaan, keberatan serta pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan dan pengembangan;

Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan perencanaan dan pengembangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan;
- e. menganalisis daftar wajib pajak serta kebijakan dan pengembangan pajak daerah
- f. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan pajak daerah dan pengelolaan
- g. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
- h. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan perencanaan dan pengembangan;
- i. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan perencanaan dan pengembangan;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait perencanaan dan pengembangan;
- k. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan;
- l. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

2. Sub Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penagihan, pemeriksaan dan keberatan;

Uraian tugas Sub Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data, monitoring pajak dan inventarisasi data tunggakan wajib pajak;
 - f. melaksanakan analisis terkait laporan keberatan wajib pajak;
 - g. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengkata pajak;
 - h. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberitahuan sangsi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang kewajiban pajak
 - i. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - j. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - l. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penagihan, pemeriksaan dan keberatan;
 - m. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan data dan informasi.

Uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kegiatan pengelolaan data dan informasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- d. melaksanakan penyusunan regulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- e. menyediakan sarana dan prasarana sitem informasi pajak daerah

- f. melaksanakan pengembangan, pengelolaan dan evaluasi terhadap sistem informasi pajak daerah
- g. mengolah, memelihara dan melaporkan basis data pendapatan daerah
- h. menghimpun dan menyerahkan laporan secara priodik data objek dan subjek pemungutan pajak serta pengembangannya
- i. melakukan rekonsiliasi dengan instansi/bidang terkait dengan pengelolaan data dan informasi;
- j. mendokumentasikan hasil penyusunan kegiatan pengelolaan data dan informasi;
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan data dan informasi;
- l. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- m. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

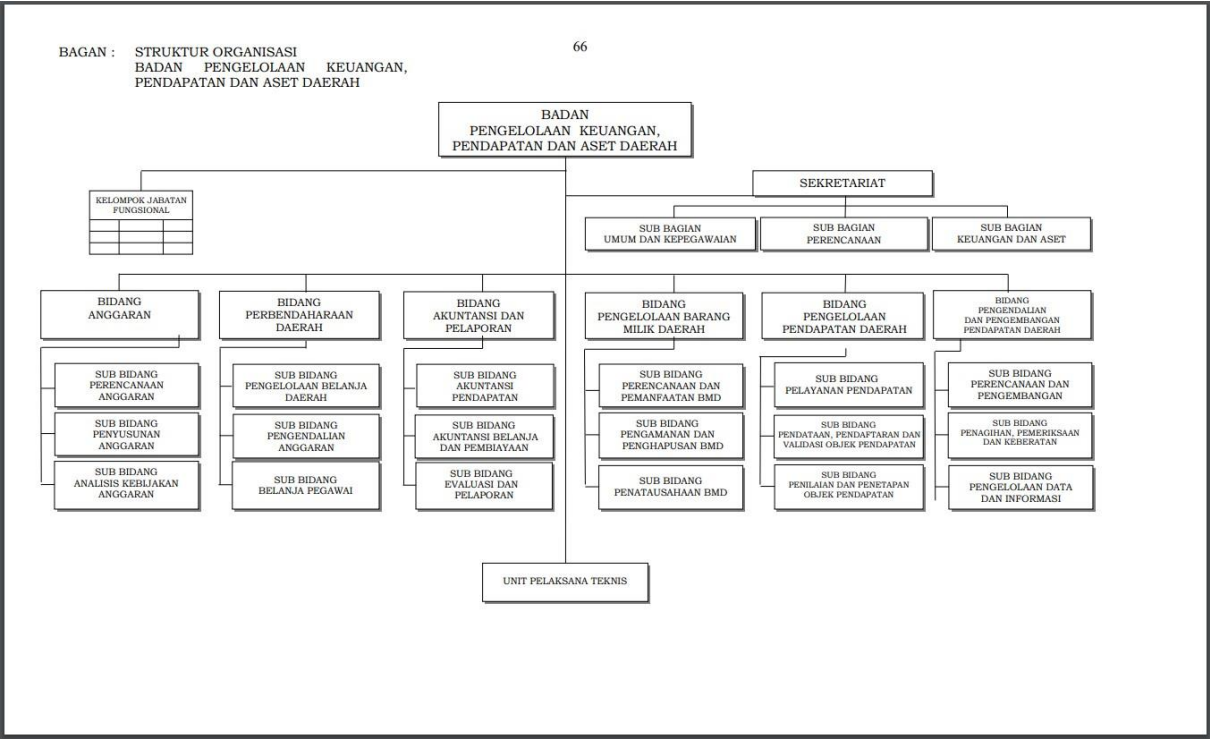
.h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

.i. Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi BPKPAD

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi permasalahan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dilakukan melalui proses analisis pohon masalah kemudian diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah. Sehingga hirarki permasalahan tersusun secara “cascading” (berjenjang) dan disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama tahun 2021-2026, maka dapat diidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum meningkatnya akuntabilitas keuangan	Sistem Pengelolaan Keuangan Belum	Penentuan pagu anggaran masih berdasarkan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	dan aset daerah	Terintegrasi	<i>historical budget</i> belum <i>money follow function</i>
			Belanja tidak sesuai dengan penganggaran dan ketentuan yang ada
			Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja yang diatur dalam anggaran kas
		Laporan keuangan berbasis akrual belum optimal	Pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum memadai
		Belum dapat mewujudkan <i>good governance</i> dalam tata kelola Barang Milik Daerah	Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib
			Sistem Informasi Aset belum optimal
			Sumber daya pengelola aset belum mendapat perhatian yang layak.
2.	Rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak masih rendah	Pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan dan mekanisme perhitungan pajak daerah masih terbatas
			Adanya potensi pajak daerah yang masih bisa digali
			Adanya wajib pajak yang belum taat membayar pajak sesuai ketentuan
		Data PBB yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada daerah tidak akurat	Data PBB belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya
			Masyarakat tidak mengetahui besaran pajak PBB yang terhutang

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Harga jual tanah transaksi BPHTB belum mengacu pada Zona Nilai Tanah (ZNT)	Tidak adanya lokasi yang mengacu pada zona nilai tanah
			Adanya penambahan wajib pajak BPHTB setiap tahun
		Komitmen dalam pencapaian target retribusi daerah belum terlaksana dengan baik	Masih adanya potensi retribusi daerah yang belum terdata oleh SKPD Pemungut
			Adanya perubahan kebijakan dan regulasi retribusi daerah
			Perlunya data penilaian dan penetapan target retribusi
		Data pendapatan daerah belum tersinkronisasi dengan baik	Kurang terbukanya data terkait pendapatan dari perusahaan daerah dan BUMD
			Perubahan data dan informasi terkait penyaluran dan serapan dana transfer tergantung keaktifan daerah
			Sumber data pendapatan daerah dipegang oleh beberapa instansi

Sumber : Dokumen Renstra 2021-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

D. ISU STRATEGIS

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam urusan penunjang keuangan dan dalam peningkatan kapasitas keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan, bidang pengelolaan pendapatan dan bidang pengelolaan barang milik daerah oleh karenanya analisis, isu strategis merupakan langkah awal didalam pencapaian akuntabilitas keuangan dan asset daerah meningkatkan dan pencapaian optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*unresolved matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis BPKPAD adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu
- b. Belum tertatanya manajemen aset daerah
- c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas keuangan daerah
- d. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan
- e. Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan
- f. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah

Aspek strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPKPAD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi BPKPAD dimasa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :

1. Metode forum *Focussed Group Discussion (FGD)* dengan dihadiri oleh para stakeholder, dan atau SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Banjar.
2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini.
3. Terdapatnya perubahan regulasi, baik terkait pengelolaan keuangan maupun aset daerah.
4. Isu-isu nasional terkait sasaran reformasi birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan, yaitu :
 - a. Mental aparatur dan manajemen perubahan
 - b. Pengawasan
 - c. Akuntabilitas

- d. Kelembagaan
- e. Tata laksana
- f. SDM ASN
- g. Peraturan perundang-undangan
- h. Pelayanan publik

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022;

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2022 dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 beserta analisisnya;

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan saran;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang – undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

BPKPAD mampu tugas membantu kepala daerah dalam urusan penunjang keuangan. Berdasar urusan dan program yang diampu, BPKPAD mendukung pencapaian misi ke-4 Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD periode 2021 - 2026 yaitu : **“Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.”** Dengan 2 (dua) tujuan yaitu (1) **“Terselenggaranya reformasi**

dalam sistem penganggaran” dengan indikator tujuan “Nilai Opini BPK” dengan sasaran “Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat” dengan indikator sasaran “Indek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)”. (2) Terselenggaranya reformasi sumber-sumber pendapatan daerah” dengan indikator tujuan “Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)” dengan sasaran “Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator sasaran “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ”.

“Terselenggaranya reformasi dalam sistem penganggaran” telah dapat memenuhi target indikator yaitu Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sesuai dengan predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Banjar secara berturut-turut selama 9 (sembilan) tahun. Sasaran “Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat” dengan indikator sasaran “Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)” telah memenuhi target yaitu 95,29 %. Nilai indeks tersebut sesuai dengan penilaian Tim Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.4/27/KUM/2022 tanggal 19 Februari 2022.

Terselenggaranya reformasi sumber-sumber pendapatan daerah” telah dapat memenuhi target indikator “Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)” yaitu 4 %. Sasaran “Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator sasaran “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah memenuhi target yaitu 8.29 %. Hasil tersebut didapat dari hasil rekapitulasi target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 dan 2022 data sampai dengan 31 Desember 2022.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilaikualitas kinerja tata kelola keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKAD diukur melalui 4 (empat) dimensi meliputi: 1. Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik; 2. Persentase perangkat daerah	$IPKAD = (a + b + c + d) : 4$ <i>Keterangan :</i> <i>a = Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik</i> <i>b = Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak</i> <i>c = Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik</i> <i>d = Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik</i>	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Nilai IPKAD	ESSELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
			dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak; 3. Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik; dan 4. Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.	<i>Daerah yang baik dan tertib</i>			
2	Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD.	Perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya; Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah adalah pendapatan yang	$\frac{\text{realisasi tahun } n - \text{realisasi tahun } n-1}{\text{realisasi tahun } n-1} \times 100 \%$	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RPJMD	ESSELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
			diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.				

Sumber : Surat Keputusan IKU BPKPAD TA. 2022

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2022 meliputi (1) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (1) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	93.03					274.127.096.288	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
				Program Pengelolaan Keuangan	– Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik – Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik – Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	% % %	87.03 96.29 83.33	226.339.126.276	Kepala Bidang Anggaran Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	%	100	1.619.519.000	Kepala Bidang Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dok	2	121.170.300	Kasubbid Perencanaan Anggaran
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dok	2	113.829.700	Kasubbid Perencanaan Anggaran
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dok	2	140.000.000	Kasubbid Analisis Kebijakan Anggaran
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dok	3	427.300.000	Kasubbid Penyusunan Anggaran
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dok	3	350.700.000	Kasubbid Penyusunan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dok	3	273.131.000	Kasubbid Analisis Kebijakan Anggaran
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dok	2	193.460.000	Kasubbid Perencanaan Anggaran
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	%	100	214.670.401.700	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dok	376	214.321.200	Kasubbid Pengendalian Anggaran
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dok	277	214.062.550.100	Kasubbid Pengendalian Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dana Transfer Lainnya					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Lap	72	38.964.400	Kasubbid Belanja Pegawai
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	354.566.000	Kasubbid Pengelolaan Belanja Daerah
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Lap	12	9.218.112.676	Kasubbid Pengendalian Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dok	54	70.000.000	Kasubbid Belanja Pegawai
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	%	100	761.020.900	Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	18	153.551.000	Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Lap	2	159.532.800	Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	2	200.063.700	Kasubbid Akuntansi Pendapatan
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dok	1	116.457.200	Kasubbid Akuntansi Belanja dan Pembiayaan
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	45	131.416.200	Kasubbid Akuntansi Belanja dan Pembiayaan
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	%	85.18	704.196.600	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	%	93.25	704.196.600	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dok	1	75.238.000	Kasubbid Perencanaan dan Pemanfaatan BMD
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dok	1	65.248.000	Kasubbid Perencanaan dan Pemanfaatan BMD
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lap	3	181.337.600	Kasubbid Penatausahaan BMD
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Lap	1	64.223.000	Kasubbid Penatausahaan BMD
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Lap	1	40.817.000	Kasubbid Pengamanan dan Penghapusan BMD
				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Lap	4	103.218.000	Kasubbid Perencanaan dan Pemanfaatan BMD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	25	93.163.000	Kasubbid Perencanaan dan Pemanfaatan BMD
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Lap	1	80.952.000	Kasubbid Penatausahaan BMD
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	4					1.576.769.751	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	94	1.576.769.751	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan & Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan
				Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	%	4	1.576.769.751	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	%	70		Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan
				Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dok	2	9.967.000	Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	2	8.585.900	Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Lap	8	57.327.500	Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1	28.086.500	Kasubbid Pengelolaan Data dan Informasi
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Lap	11	94.344.200	Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Validasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Objek Pendapatan
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lap	4	21.703.800	Kasubbid Pengelolaan Data dan Informasi
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	8300	106.687.000	Kasubbid Penilaian dan Penetapan Objek Pendapatan
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dok	3	14.028.000	Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Validasi Objek Pendapatan
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	3168	10.224.100	Kasubbid Pelayanan Pendapatan
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dok	16	61.225.600	Kasubbid Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dok	11	1.025.685.371	Kasubbid Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dok	120	6.574.400	Kasubbid Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dok	160	94.007.880	Kasubbid Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lap	4	38.322.500	Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan indeks kepatuhan dan kinerja intern	%	70	45.507.003.661	Sekretaris
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	%	100	77.702.893	Kasubbag Perencanaan
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	18.880.088	Kasubbag Perencanaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	11.424.000	Kasubbag Perencanaan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	8.084.200	Kasubbag Perencanaan
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	13.128.900	Kasubbag Perencanaan
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.084.900	Kasubbag Perencanaan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	8.548.300	Kasubbag Perencanaan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	10.552.505	Kasubbag Perencanaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	40.363.839.532	Kasubbag Keuangan
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1008	39.955.767.099	Kasubbag Keuangan
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	384.318.133	Kasubbag Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Laporan	2	12.624.300	Kasubbag Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	11.130.000	Kasubbag Keuangan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	%	100	30.036.800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	10.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	20.036.800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	956.421.774	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	7.292.600	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	178.912.704	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	6.530.300	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	108	11.376.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	752.310.170	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	289.118.400	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	23	215.257.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	22.903.800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	2.743.844.262	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	405.149.332	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	2.338.694.930	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	1.046.040.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	79.980.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	67	548.673.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	31.885.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	166.692.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	44	157.970.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB EGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	60.840.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2022

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2022.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$Capaian\ Indikator\ kinerja = ((Rencana - (Realisasi - Rencana)) / Rencana)) \times 100 \%$$

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja (BPKPAD) Kab. Banjar tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hi jau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Orange
4	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning
5	< 50%	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKPAD Kab Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKPAD Kab. Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	$IPKAD = (a + b + c + d) : 4$ Keterangan : a = Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik; b = Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak; c = Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik; d = Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.	%	93.09	95.29	102.36 %	Sangat Tinggi
	– Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	Jumlah perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik / Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Banjar x 100 %	%	87.03	85.40	98.13 %	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	Jumlah perangkat daerah dengan penyerapan belanja daerah yang baik / Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Banjar x 100 %	%	96.29	100	103.85 %	Sangat Tinggi
	- Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	Jumlah perangkat daerah dengan laporan keuangan dengan kategori baik / Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Banjar x 100 %	%	83.33	100	120.00 %	Sangat Tinggi
	- Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	Jumlah Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib / Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Banjar x 100 %	%	85.18	95.74	112.40 %	Sangat Tinggi
Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	Jumlah Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penunjangnya / Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penunjangnya sesuai ketentuan X 100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terverifikasinya RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang tersusun	Dok	3	3	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	Dok	3	3	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang tersusun	Dok	3	3	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang tersusun	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	Jumlah penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu / Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) x 100 %	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dok	376	376	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dok	277	277	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Lap	72	72	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	47	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Lap	12	12	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dok	54	54	100%	Sangat Tinggi
Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan / Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditargetkan x 100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan							
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	18	18	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Lap	2	2	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dok	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	45	45	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	Jumlah Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib / Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Banjar x 100 %	%	85.18	95.74	112.40%	Sangat Tinggi
Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan / Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ditargetkan x 100%	%	93.25	100	107.23%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dok	1	1	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dok	1	1	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lap	3	3	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	25	25	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Milik Daerah						
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{(\text{realisasi tahun } n - \text{realisasi tahun } n-1)}{\text{realisasi tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	-5,78		
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun } n}{\text{Target Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun } n} \times 100\%$	%	94	93	98.93%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	$\frac{\text{realisasi pajak tahun } n - \text{realisasi pajak tahun } n-1}{\text{realisasi pajak tahun } n-1} \times 100\%$ Keterangan : Rata-rata capaian pertumbuhan dari pajak dan retribusi daerah	%	4	13.56	339%	Sangat Tinggi
	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	$\frac{\text{jumlah wajib pajak yang patuh}}{\text{jumlah wajib pajak daerah}} \times 100\%$ Keterangan : Rata-rata kepatuhan wajib pajak dari 11 layanan pajak	%	70	78.13	111.61%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	2	2	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Lap	8	8	100%	Sangat Tinggi
Tersediannya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1	1	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Lap	11	18	163,64%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersusunnya Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lap	4	4	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	8300	8811	106,16%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dok	3	3	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	3168	3168	100%	Sangat Tinggi
Terverifikasinya Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dok	16	16	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dok	11	11	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dok	120	120	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dok	160	160	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lap	4	4	100%	Sangat Tinggi
Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Peningkatan indeks kepatuhan dan kinerja intern	$\Sigma (\text{unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{unsur pelayanan umum} \times 30\%)$ Penilaian Mandiri Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern BPKPAD Kabupaten Banjar merupakan salah satu instrument untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan sistem pengendalian intern pada BPKPAD Kabupaten Banjar	indeks	70	92,57	132.24 %	Sangat Tinggi
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan / Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang ditargetkan x	%	100	128.57	128.57%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	dengan ketentuan	100%					
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	9	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2	200%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2	200%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Perubahan DPA-SKPD							
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	19	100%	Sangat Tinggi
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1008	1008	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Laporan	2	2	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100%	Sangat Tinggi
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100	100	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	2	100%	Sangat Tinggi
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100%	Sangat Tinggi
Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100%	Sangat Tinggi

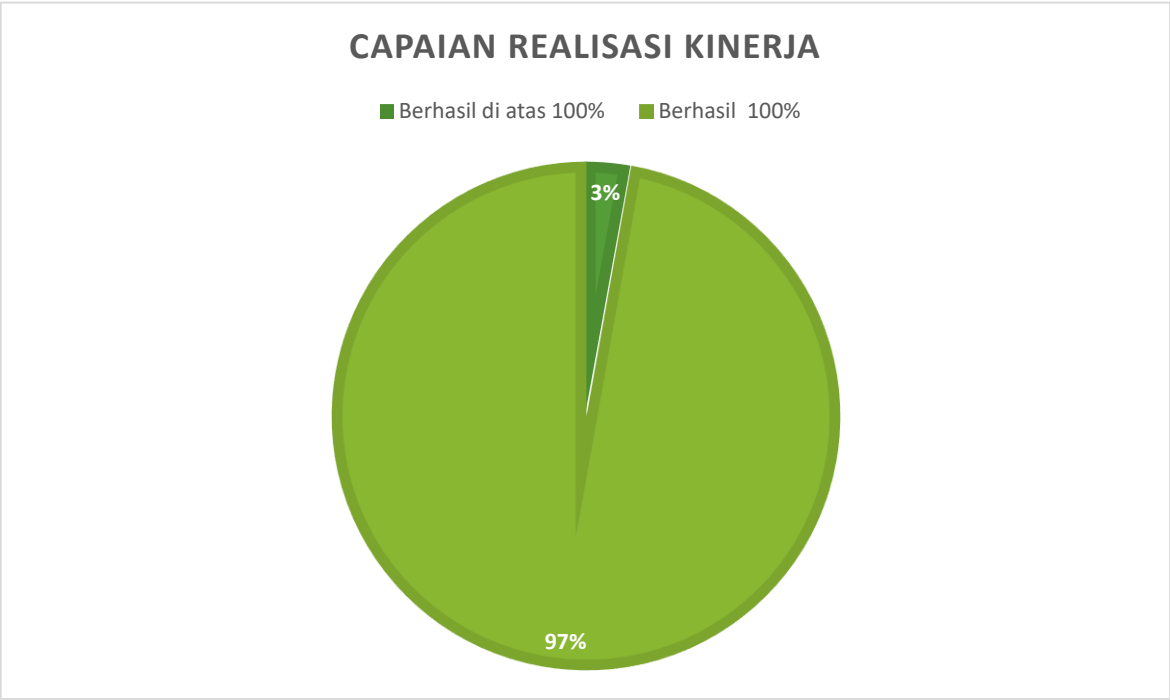
SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	100%	Sangat Tinggi
Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	108	108	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%	Sangat Tinggi
Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
Tersedianya Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100%	Sangat Tinggi
Tersedianya Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	23	23	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	12	100%	Sangat Tinggi
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	100%	Sangat Tinggi
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	13	100%	Sangat Tinggi
Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah x 100%	%	100	109.82	109.82	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
sesuai dengan ketentuan							
Terfasilitasinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	67	73	108.96%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	44	44	100%	Sangat Tinggi
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3	150%	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Realisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar 2022



Sumber : Data Realisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar 2022

Berdasarkan data pada tabel 3.2 bahwa hampir semua indikator mencapai 100% (sangat tinggi). Pada tujuan (1) **“Terselenggaranya reformasi dalam sistem penganggaran”** dengan indikator tujuan **“Nilai Opini BPK”** di tahun 2022 Kabupaten Banjar dapat mencapai target dengan memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diberikan oleh BPK. Opini WTP tersebut dapat dicapai karena Kabupaten Banjar dinilai berhasil menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, memenuhi kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, memiliki kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektif dalam sistem pengendalian intern terhadap keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset. Sasaran **“Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat”** dengan indikator sasaran **“Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)”** telah memenuhi target yaitu **95,29 %**. Nilai indeks tersebut sesuai dengan penilaian Tim Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.4/27/KUM/2022 tanggal 19 Februari 2022.

Pada tujuan **Terselenggaranya reformasi sumber-sumber pendapatan daerah** dengan target indikator **“Persentase peningkatan pendapatan asli**

daerah (PAD) ” . Sasaran “Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator sasaran “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu -5,78 %. Persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 92.82%.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan persentase peningkatan PAD perlu dilakukan perumusan kategori tingkat pencapaiannya. Pada tabel berikut dibuat beberapa kategori tingkat keberhasilan, sebagai berikut :

Kategori Capaian	Uraian	Keterangan
A	apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 110%;	Sangat Baik
B	apabila 90% < rata2 capaian kinerja< 110%;	Baik
C	apabila 60% < rata2 capaian kinerja < 90%;	Cukup
D	apabila 40% < rata2 capaian kinerja < 60%	Kurang
E	apabila rata2 capaian kinerja < 40%	Buruk

Sumber Data: Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021

Berdasarkan kategori keberhasilan tabel diatas, bahwa capaian PAD dengan persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 92.82%. Nilai ini masuk dalam kategori “B” yaitu “Baik” .

Berdasarkan hasil rekapitulasi target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 dan 2022 data sampai dengan 31 Desember 2022, Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah -5,78%, dengan rincian sebagai berikut:

	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Peningkatan (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	217. 727. 181. 400	221. 010. 477. 564	205. 146. 282. 499	-5, 78 %
Pajak Daerah	80. 995. 317. 631	82. 661. 526. 690	93. 727. 655. 167	15, 72 %

Retribusi Daerah	5.921.606.520	6.548.731.174	6.598.693.934	11,43 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.596.447.089	11.480.574.630	716.777.0066	28,08 %
Lain-Lain PAD Yang Sah	125.213.810.160	120.319.645.070	97.652.163.332	-22,01 %

Dari ke empat komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut, hanya 2 komponen yang berada dalam wewenang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 93.727.655.167,- dari target Rp. 82.661.526.690,- dengan peningkatan 15,72%. Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 6.598.693.934,- dari target Rp. 6.548.731.174,- dengan peningkatan 11,43%.

Capaian peningkatan tersebut diatas target yang hanya 4%. Tetapi secara total peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai -5,78%, karena salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lain mengalami penurunan pendapatan, yaitu pada kompoenen Lain-Lain PAD yang Sah. Lain-Lain PAD yang Sah didalamnya adalah perusahaan daerah yang pada kewenangan tidak berada dibawah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sehingga terdapat kesulitan pada intervensi dan koordinasi untuk meningkatkan PAD. Berdasarkan hasil tersebut, komponen Lain-Lain PAD yang Sah sangat mempengaruhi capaian PAD dan nilai peningkatan PAD maka pada tahun 2023 akan dilaksanakan koordinasi dan intervensi secara lebih massif dan konfhrensif agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar dapat tercapai dengan maksimal.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi

Daerah, Pendapatan Dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Pendapatan Denda Pelanggaran Peraturan Daerah, Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP, dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

A. 2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyebabkan adanya perbedaan terkait dengan program/kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran 2019–2020 dengan tahun anggaran 2021, sehingga untuk tabel perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya tidak bisa dipenuhi secara presisi. Tetapi dapat dibandingkan dengan indikator yang sama untuk subkegiatan dari tahun anggaran 2021 dengan tahun anggaran 2022.

Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKAD diukur melalui 4 (empat) dimensi meliputi: 1. Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik; 2. Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak; 3. Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik; dan 4. Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.	Persen	91,84	100%	Persen	93,09	102,36%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	Jumlah Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penunjangnya / Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penunjangnya sesuai ketentuan X 100%	%	100	111%	%	100	100%
01. Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	–	–	–	Dok	2	100%
02. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	–	–	–	Dok	2	100%
03. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	SKPD	54	100%	Dok	2	100%
07. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dok	2	100%	Dok	3	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
08. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dok	3	300%	Dok	3	100%
09. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dok	4	100%	Dok	3	100%
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Jumlah bulan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah yang terlaksana	Bulan	12	100%	–	–	–
11. Koordinasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dok	3	100%	Dok	2	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Anggaran Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah							
Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Jumlah SP2D yang diterbitkan / jumlah target SP2D X 100%	%	100	100%	%	100	100%
03.Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dok	1000	100%	Dok	376	100%
05.Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Desa	277	100%	Dok	277	100%
07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil	–	–	–	Lap	72	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Pemungutan/Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						
11. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	SKPD	96	100%	Orang	47	100%
09. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tahun	1	100%	Lap	12	100%
02. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	SKPD	54	100%	Dok	54	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Daerah								
Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan / Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditargetkan x 100%	%	100	100%	%	100	100%
03. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjaw	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	12	100%	Lap	18	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
aban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran								
04.Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited))	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited))	Lap	2	100%	Lap	2	100%
05.Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaw	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	1	100%	Dok	2	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								
09.Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara n Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	Jumlah dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	Dok	1	100%	Dok	1	100%
10.Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dok	1	100%	–	–	–
11.Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	–	–	–	Orang	45	100%
Meningkatnya pengelolaan	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan	Jumlah Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan	%	100	100%	%	85.18	112.40%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	Tertib / Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Banjar x 100 %						
Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan / Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ditargetkan x 100%	%	100	100%	%	93.25	107.23%
01. Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa yang tersusun	Jumlah dokumen Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa yang tersusun	Dok	1	100%	Dok	1	100%
03. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dok	2	100%	Dok	1	100%
05. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Pengurus Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	3	100%	Lap	3	100%
06. Inventarisasi Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Dok	1	100%	Lap	1	100%
07. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Unit/ bidang	15	100%	Lap	1	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
08. Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BarangMilik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BarangMilik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	–	–	–	–	–	–
10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	43	126.67%	Dok	25	100%
11.Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dok	4	100%	Lap	1	100%
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{(\text{realisasi tahun n} - \text{realisasi tahun n-1})}{\text{realisasi tahun n-1}} \times 100\%$	%	4	130.5%	%	4	
	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	$\frac{\text{realisasi pajak tahun n} - \text{realisasi pajak tahun n-1}}{\text{realisasi pajak tahun n-1}} \times 100 \%$ Keterangan : Rata-rata capaian pertumbuhan dari pajak dan retribusi daerah				%	4	339%
	Persentase peningkatan wajib	$\frac{\text{jumlah wajib pajak yang patuh}}{\text{jumlah wajib pajak yang patuh}} \times 100 \%$				%	70	111.61%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA pajak daerah yang patuh	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
		jumlah wajib pajak daerah Keterangan : Rata-rata kepatuhan wajib pajak dari 11 layanan pajak						
01. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	–	–	–	Dok	2	100%
02. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Lap	19	84, 21%	Dok	2	100%
03. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Wajib Pajak	250	100, 00%	Lap	8	100%
04. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	–	–	–	Unit	1	100%
05. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jenis	85	88, 24%	Lap	11	163, 64%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
06. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	WP	135.000	129,52%	Lap	4	100%
07. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	WP	3.300	137,27%	Objek Pajak	8300	106,16%
08. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	Dok	2	100,00%	Dok	3	100%
09. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)	WP	110.000	83,93%	Dok	3168	100%
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dok	16	100,00%	Dok	16	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Rp	450.000.000	121,05%	Dok	11	100%
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	–	–	–	Dok	120	100%
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	WP	200	101,01%	Dok	120	100%
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	10	100,00%	Lap	4	100%
	Peningkatan indeks kepatuhan dan kinerja intern	Σ (unsur kinerja utama x 40%)+(unsur kepatuhan x 30%)+(unsur pelayanan umum x 30%)				%	70	132,24%
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan / Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang ditargetkan x 100%	%	100	108.33%	%	100	128.57%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	133.33%	Dok	9	100%
02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	3	133.33%	Dok	1	100%
03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	–	–	–	Dok	2	200%
04. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	–	–	–	Dok	1	100%
05. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	–	–	–	Dok	2	200%
06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	12	100%	Lap	3	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
07.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	2	100%	Lap	19	100%
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100%	%	100	100%
01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (72 orang x 14 bulan)	1	Tahun	100%	Orang/ Bulan	1008	100%
03.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	100%	Dok	12	100%
05.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	2	Dok	100%	Lap	2	100%
07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	Lap	18	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD							
	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100%	%	100	100%
05. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	–	–	–	Dok	12	100%
11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta	8	100%	Orang	2	100%
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100%	%	100	100%
01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	–	–	–	Paket	12	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Kantor								
02. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	100%	Paket	12	100%
06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Buku	1	100%	Dokumen	108	100%
09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	–	–	–	Laporan	12	100%
	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100%	%	100	100%
09. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	–	–	–	Unit	1	100%
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	–	–	–	Unit	23	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
atau Bangunan Lainnya								
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Bulan	12	100%	Unit	12	100%
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100%	%	100	100%
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening	24	100%	Lap	36	100%
04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	100%	Lap	13	100%
	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah x 100%	%	100	100%	%	100	109.82%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tahun	1	100%	Unit	1	100%
02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tahun	1	100%	Unit	67	109.82%
06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	–	–	–	Unit	12	100%
09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	–	–	–	Unit	3	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	TA 2021			TA 2022		
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
dan Bangunan Lainnya								
10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	1	100%	Unit	44	100%
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	12	100%	Unit	2	150%

Sumber : LRFK Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar TA. 2021 dan TA 2022



Sumber : LRFK Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar TA. 2021 dan TA 2022

Berdasarkan data pada tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPKPAD konsisten selalu berada pada kisaran persentase 100%, sehingga capaian indikator program pada BPKPAD dapat dinilai sangat baik.

Dibandingkan dengan realisasi indikator program kegiatan pada tahun anggaran 2021, capaian realiasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar secara keseluruhan sudah baik yang tercermin pada besaran capaian indikator yang rata-rata mencapai 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berhasil dapat melaksanakan seluruh program kegiatan yang sudah direncanakan. Untuk tahun 2023 program yang sudah mencapai target 100% akan terus dipertahankan dengan terus memperbaiki kualitas output yang dihasilkan. Usaha yang dilakukan adalah dengan cara menggerakkan seluruh elemen pejabat dan staf pelaksana yang ada di Badan Pengelolaan Keuamgan dan Aset Daerah,

membangun komitmen bersama untuk untuk sama-sama meningkatkan kinerja ke depannya, bergerak secara bersama-sama pula untuk menyusun seperangkat kekuatan meminimalisir faktor-faktor penghambat kinerja.

Tabel 3.4

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5				6		7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
												268,109,142,617	272,204,817,644		275,765,481,820		276,141,581,745		276,916,257,203		276,916,257,203					
Sasaran 4.1.3 : Terselenggaranya reformasi dalam sistem penganggaran	Nilai Opini BPK										WTP	223,058,300,700	WTP	224,064,546,750	WTP	228,059,403,225	WTP	228,254,908,068	WTP	228,607,521,994	WTP	228,607,521,994	BPKPAD	Kab. Banjar		
		Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)								93.09%	223,058,300,700	94.34%	224,064,546,750	95.36%	228,059,403,225	97.08%	228,254,908,068	98.61%	228,607,521,994	98.61%	228,607,521,994	BPKPAD	Kab. Banjar		
						5	2	2		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	87.03%	222,320,499,100	88.88%	223,357,656,150	90.73%	227,352,512,625	92.58%	227,548,017,468	95.05%	227,900,631,394	95.05%	227,900,631,394	BPKPAD	Kab. Banjar

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

				5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan AliranKas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	72	44.658.000	Laporan	72	44.658.000	100%	211.750.000	100%	232.925.000	100%	256.217.500	100%	256.217.500	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Pituang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pituang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pituang dan UtangDaerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar

				5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar		
				5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	365,366,000	Orang	47	400,000,000	100%	478,826,000	100%	478,826,000	100%	478,826,000	100%	478,826,000	100%	478,826,000	100%	478,826,000	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Persen	100	825,212,800	Persen	100	1,565,000,000	100	1,565,000,000	Persen	100	1,565,000,000	Persen	100	1,642,558,600	Persen	100	1,642,558,600	BPKPAD	Kab. Banjar	

				5	2	2	2.04	5	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pinjaman Daerah	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	2	2.04	6	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	2	2.04	7	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	100.00	5.000.000.000	Laporan	100.00	5.000.000.000	Laporan	100.00	5.000.000.000	Laporan	100.00	5.000.000.000	Laporan	100.00	5.000.000.000	Laporan	100.00	5.000.000.000	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar

				5	2	2	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terselesaikannya SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelesaian SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%		70,000,000	100%		165,816,750	100%	182,398,425	100%		200,638,268	100%	220,702,094	100%	220,702,094	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	2	2.05	1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	54	70,000,000	Dokumen	55	120,000,000	54 SKPD	182,398,425	54 SKPD		200,638,268	54 SKPD	220,702,094	54 SKPD	220,702,094	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	2	2.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar

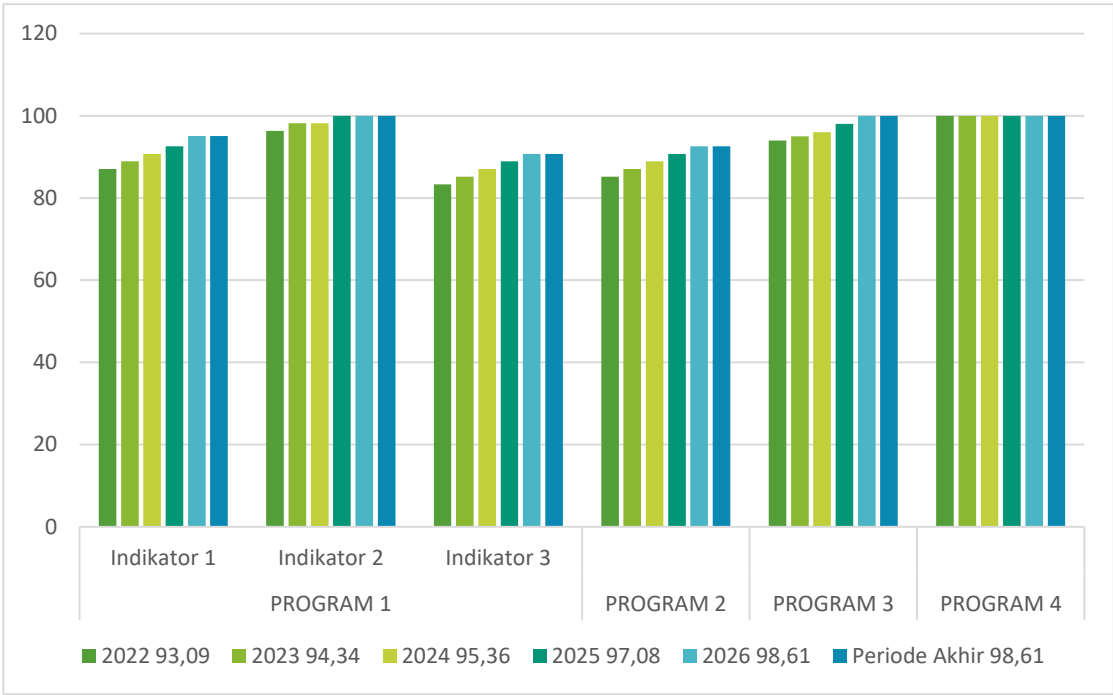
				5	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	Laporan	4	5,000,000	4	5,000,000	Laporan	4	5,000,000	Laporan	4	5,000,000	Laporan	4	5,000,000	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	Laporan	1	15,000,000	1	15,000,000	Laporan	1	15,000,000	Laporan	1	15,000,000	Laporan	1	15,000,000	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persen	100.00	40,000,000	Persen	100.00	60,000,000	100.00	60,000,000	Persen	100.00	60,000,000	Persen	100.00	60,000,000	Persen	100.00	60,000,000	BPKAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	Unit	-	-	-	Unit	-	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	Paket	-	-	-	Paket	-	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar

				5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	Unit	.	.	BPKPAD	Kab. Banjar

					5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan DinasOperasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	67	548,673,000	Unit	67	548,673,000	Unit	67	548,673,000	Unit	67	548,673,000	Unit	67	548,673,000	BPKPAD	Kab. Banjar
					5	2	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar
					5	2	1	2.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar
					5	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar
					5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	31,885,000	Unit	12	41,885,000	Unit	12	31,885,000	Unit	12	31,885,000	Unit	12	31,885,000	BPKPAD	Kab. Banjar

				5	2	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	Unit	-	-	-	Unit	-	-	-	Unit	-	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	-	Unit	-	-	-	Unit	-	-	-	Unit	-	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	50,500,100	150,000,000	2	50,500,100	150,000,000	2	Unit	2	50,500,100	150,000,000	2	Unit	2	50,500,100	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	34	157,970,000	203,040,000	34	157,970,000	203,040,000	34	Unit	34	157,970,000	203,040,000	34	Unit	34	157,970,000	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	60,840,000	600,840,000	2	60,840,000	600,840,000	2	Unit	2	60,840,000	600,840,000	2	Unit	2	60,840,000	BPKPAD	Kab. Banjar
				5	2	1	2.09	12	Pemeliharaan/R ehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	-	-	-	Ha	-	-	-	Ha	-	-	-	Ha	-	-	-	BPKPAD	Kab. Banjar

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD Kabupaten Banjar 2021-2026



Sumber : Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD Kabupaten Banjar 2021-2026

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bawah target indikator terus meningkat setiap tahun hingga periode akhir Renstra. Dengan target yang telah disusun sesuai kinerja yang selama ini telah dicapai, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah mampu mencapai target hingga periode akhir Renstra.

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2022 Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2026, untuk mengetahui kemampuan BPKPAD selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dan target capaian periode akhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKAD diukur melalui 4 (empat) dimensi meliputi:	%	95.29	98.61	96.63%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik; 2. Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak; 3. Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik; dan 4. Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.				
	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	Jumlah perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik / Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Banjar x 100 %	%	85.40	95.05	89.85%
	Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	Jumlah perangkat daerah dengan penyerapan belanja daerah yang baik / Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Banjar x 100 %	%	100	100	100%
	Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	Jumlah perangkat daerah dengan laporan keuangan dengan kategori baik / Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Banjar x 100 %	%	100	90.73	110,21%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	Jumlah Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib / Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Banjar x 100 %	%	95.74	92.58	103.41%
	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	Jumlah Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penunjangnya / Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penunjangnya sesuai ketentuan X 100%	%	100	100	20%
01. Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dok	2	10 (2)	20%
02. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dok	2	10 (2)	20%
03. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dok	2	10 (2)	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
07. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dok	3	15	20%
08. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dok	3	15	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
09. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dok	3	15	20%
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Jumlah bulan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah yang terlaksana	–	–	–	–
11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dok	2	10	20%
	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	Jumlah penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu / Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) x 100 %	%	100	100	20%
03. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dok	376	1880	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
dan SPD						
05. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dok	277	1385	20%
07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi	Lap	72	360	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
11. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	235	20%
09. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Lap	12	60	20%
02. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dok	54	270	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan / Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditargetkan x 100%	%	100	100	20%
03. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	18	90 (18)	20%
04. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited))	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited))	Lap	2	10	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Daerah						
05. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	2	10	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
09. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	Jumlah dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	Dok	1	5	20%
10. Penyusunan Sistem dan Prosedur Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
11. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	45	225	20%
	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan / Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ditargetkan x 100%	%	107.23	96.50	111.11%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
01. Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa yang tersusun	Jumlah dokumen Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa yang tersusun	Dok	1	5	20%
03. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dok	1	5	20%
05. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Pengurus Barang Milik Daerah yang tersusun	Lap	3	15	20%
06. Inventarisasi Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Lap	1	5	20%
07. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Lap	1	5	20%
08. Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Lap	4	20	20%
10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	25	125	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
an, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Daerah					
11.Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Lap	1	5	20%
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{(\text{realisasi tahun } n - \text{realisasi tahun } n-1)}{\text{realisasi tahun } n-1} \times 100\%$	%	-5,78	4	
	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	$\frac{\text{realisasi pajak tahun } n - \text{realisasi pajak tahun } n-1}{\text{realisasi pajak tahun } n-1} \times 100 \%$	%	13.56	4	339
		Keterangan : Rata-rata capaian pertumbuhan dari pajak dan retribusi daerah				
	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	$\frac{\text{jumlah wajib pajak yang patuh}}{\text{jumlah wajib pajak daerah}} \times 100 \%$ Keterangan : Rata-rata kepatuhan wajib pajak dari 11 layanan	%	78.13	70	111.61

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
		pajak				
01. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dok	2	10	20%
02. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	2	10	20%
03. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Lap	8	40	20%
04. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1	5	20%
05. Pendataan dan Pendaftaran	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Lap	18	55	32, 72%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Objek Pajak Daerah	Pajak dan Wajib Pajak Daerah					
06. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lap	4	20	20%
07. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	8811	41500	21.23%
08. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	Dok	3	15	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
09. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)	Dok	3168	15840	20%
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dok	16	80	20%
11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dok	11	55	20%
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dok	120	600	20%
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dok	160	800	20%
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lap	4	20	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan indeks kepatuhan dan kinerja intern	Σ (unsur kinerja utama x 40%)+(unsur kepatuhan x 30%)+(unsur pelayanan umum x 30%)	%	132, 24	100	92, 57%
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan / Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang ditargetkan x 100%	%	128. 57	100	20%
01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	9	45	20%
02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	5	20%
03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	5	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
04. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	2	5	40%
05. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	2	5	40%
06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	3	15	20%
07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	19	95	20%
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (72 orang x 14 bulan)	Orang/ Bulan	1008	5040	20%
03.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	60	20%
05.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Lap	2	10	20%
07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap	18	90	20%
	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
05. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	12	60	20%
11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	10	20%
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100	20%
01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	60	20%
02. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	108	540	20%
09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	60	20%
	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang ditargetkan x 100%	%			
09. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5	20%
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	23	115	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	12	60	20%
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ditargetkan x 100%	%	100	100	20%
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	36	180	20%
04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	13	65	20%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian subkeg Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan / jumlah capaian kinerja yang ditargetkan x 100%	%	100	100	20%
01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	5	20%
02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	73	335	21.79%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2026)
1	2	3	4	5	6	7
06.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	60	20%
09.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	15	20%
10.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	44	220	20%
11.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	10	20%

Sumber : Renstra & RFK TA. 2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

TABEL 3.6

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2022, REALISASI PROVINSI DAN NASIONAL

Sasaran/ Program	Indikator Sasaran/ Program	Satuan	Realisasi Provinsi Tahun 2022	Realisasi Nasional Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD)	%	19.04%	Data belum tersedia	8.29%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	%	100%		85.40%
	Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	%			100%
	Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	%			100%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	%			95.74%

Sumber : Laporan Kinerja BPKPAD TA 2022, LAKIP BAKEUDA Prov. Kalimantan Selatan,
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat>

B. 1 SASARAN :

Hasil evaluasi capaian kinerja BPKPAD melalui 2 (dua) sasaran, yaitu :

Tabel 3.7
Realisasi Indikator BPKPAD Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	93.09 %	95.29 %	102.43 %
2.	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	4 %	-5,78 %	-144 %

Sumber : LRFK TA.2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Banjar

➤ **Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat**, indikator kinerja pada tahun 2022 yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) dapat memenuhi target yang direncanakan, dengan capaian Berhasil.

Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

IPKAD diukur melalui 4 (empat) dimensi meliputi :

1. Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik;
2. Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak;
3. Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik; dan

4. Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.

Hal tersebut dapat dilihat dalam hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu 95.29% untuk tahun anggaran 2022. Hal tersebut menggambarkan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai 102.43% (**Sangat Tinggi**).

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Melakukan Pengembangan Sistem Informasi Laporan Keuangan Manajemen Aset yang terintegrasi seluruh SKPD sebagai Pengelolaan Data yang akurat efektif dan dapat dipercaya untuk mendukung Laporan Keuangan.
2. Melakukan monitoring dan memperkuat Fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam mengawal Pelaksana kegiatan SKPD.
3. Melakukan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Serta Sosialisasi untuk memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI.

Faktor penghambat sasaran ini adalah :

1. Kurangnya tertib SKPD menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan dan Manajemen Aset .
2. Belum Optimalnya Pengembangan Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam penyampaian Laporan Keuangan SKPD.
3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran

1. Masih kurang maksimalnya pengetahuan sumber daya pengelolaan keuangan SKPD tentang pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tentang pengelolaan barang milik daerah

Upaya agar bisa mempertahankan atau meningkatkan perbaikan :

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan mengenai pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tentang

pengelolaan barang milik daerah secara lebih intensif dan berkelanjutan.

2. Melakukan pembinaan kepada SKPD untuk melakukan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah secara tertib,transfaran dan akuntabel termasuk melakukan rekonsiliasi Aset secara berkesinambungan.

Tindak lanjut yang akan datang :

1. Menambah kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan kepada SKPD
2. Rekonsiliasi Aset BMD tiap pertriwulan, membuat papan nama untuk tanah yang masuk data Aset Daerah.
3. Koordinasi daengan Dinas Pertanahan untuk melaksanakan Sertifikasi tanah ke kantor Pertanahan.
4. Membuat surat edaran ke SKPD untuk melakukan penatausahaan, pemeliharaan dan pengaman aset yang digunakannya.

➤ **Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**, indikator kinerja pada tahun 2022 yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memenuhi target yang direncanakan, dengan capaian Berhasil.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi *outcome* dan dibuat secara berjenjang (*cascading*) sampai ke eselon terendah;
2. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan *baseline* data dan cara penghitungannya;
3. Diberlakukannya sistem pajak online; dan
4. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

Faktor penghambat pencapaian sasaran ini adalah :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah masih rendah;

2. Data PBB yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada daerah tidak akurat;
3. Harga jual tanah transaksi BPHTB belum mengacu pada Zona Nilai Tanah (ZNT);
4. Komitmen dalam pencapaian target retribusi daerah belum terlaksana dengan baik;
5. Data pendapatan daerah belum tersinkronisasi dengan baik; dan
6. Karena adanya pengurangan anggaran atau rasionalisasi anggaran.

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

Masih adanya komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target, namun masih dalam rentang “cukup berhasil”, yaitu komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Upaya perbaikan :

Mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya target, yaitu program pencapaian target retribusi daerah masih dibawah nilai 100 dengan adanya forum SKPD pemungut sehingga mudah dalam penyampaian informasi.

Dari data tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPKPAD dari tahun 2021 sampai dengan 2022 konsisten selalu berada pada kisaran persentase 90% ke atas, sehingga capaian indikator program pada BPKPAD dapat dinilai sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi indikator program kegiatan pada tahun anggaran 2021, capaian realiasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar dinilai mendapat kemajuan. Berdasarkan data yang diperoleh, secara keseluruhan sudah baik yang tercermin pada besaran capaian indikator yang rata-rata mencapai 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berhasil dapat melaksanakan seluruh program kegiatan yang sudah direncanakan.

Berdasarkan data pada tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2022 hampir semua program dan kegiatan berhasil mencapai target, jika dibandingkan dengan capaian periode akhir Renstra tahun 2026 untuk capaian realisasi seluruh program dan kegiatan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah mampu sesuai dan mencapai target RPJMD Periode 2021–2026.

Berdasarkan data pada tabel 3.7 dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2022 rata-rata capaian realisasi kinerja sub kegiatan yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar adalah 100%.

Usaha yang dilakukan adalah dengan cara menggerakkan seluruh elemen pejabat dan staf pelaksana yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, membangun komitmen bersama untuk untuk sama-sama meningkatkan kinerja ke depannya, bergerak secara bersama-sama pula untuk menyusun seperangkat kekuatan meminimalisir faktor-faktor penghambat kinerja.

Analisa Capaian Kinerja Program/Kegiatan :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2022 dapat mencapai realisasi anggaran sebesar Rp.219.047.854.505,- dari pagu Rp. 226.339.126.276,-. Dan realisasi fisik mencapai 96,78%.

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah ada 5 kegiatan dan 19 sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS. Realisasi fisik mencapai 100% Pada sub kegiatan ini menghasilkan 2 dokumen yaitu dokumen KUA dan PPAS sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 110.980.300,- dari pagu Rp. 121.170.300,- yaitu mencapai 91.59%.

Faktor Penghambat : Keuangan menunggu APBD, Keuangan menunggu perubahan APBD, dan pergeseran belanja pemeliharaan SIMDA.

Cara mengatasi : Berkoordinasi dan selalu menanyakan terkait keuangan APBD

Faktor Pendorong :

- Jadwal pelaksanaan tepat waktu
 - Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
 - Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
 - Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS. Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Pada sub kegiatan ini menghasilkan 2 dokumen yaitu dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 102.497.200,- dari pagu Rp. 113.829.700,- yaitu mencapai 90.04%.

Faktor Penghambat : Keuangan menunggu APBD, Keuangan menunggu perubahan APBD, dan pergeseran belanja pemeliharaan SIMDA.

Cara mengatasi : Berkoordinasi dan selalu menanyakan terkait keuangan APBD

Faktor Pendorong :

- Jadwal pelaksanaan tepat waktu
- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD. Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% dengan output 54 SKPD yaitu aktivitas di dalamnya penyusunan RKA dan Desk dengan semua SKPD, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 122.938.000,- dari pagu Rp.140.000.000,- yaitu mencapai 87.81%.

Faktor Penghambat : Kegiatan tersebut terkendala karena adanya pemunduran jadwal Evaluasi provinsi terhadap Rapeda APBD.

Cara mengatasi :

- Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan.
- Menyesuaikan dengan jadwal evaluasi provinsi.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

- d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% menghasilkan 2 produk hukum yaitu Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2023 dan Rancangan Perbup penjabaran APBD Tahun 2023, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 399.283.800,- dari pagu Rp. 427.300.000,- yaitu mencapai 93.44%.

Penghambat : Kegiatan tersebut terkendala karena adanya pemunduran jadwal Evaluasi provinsi terhadap Rapeda APBD.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.

- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% menghasilkan 2 produk hukum yaitu Penyusunan APBD Perubahan dan Perbup penjabaran APBD perubahan, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 317.095.000,- dari pagu Rp. 350.700.000,- yaitu mencapai 90.42%.

Penghambat : Kegiatan tersebut terkendala karena adanya pemunduran jadwal dari DPRD.

Cara mengatasi :

- Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan.
- Menyesuaikan dengan jadwal dari DPRD.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
 - Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
 - Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran. Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% menghasilkan 4 produk hukum yaitu Penyusunan Regulasi serta kebijakan anggaran, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 241.555.000,- dari pagu Rp. 273.131.000,- yaitu mencapai 88.44%.

Penghambat : Menunggu evaluasi provinsi terhadap raperda

Cara Mengatasi : Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan dan Menyesuaikan dengan jadwal evaluasi provinsi.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
 - Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
 - Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.
 - Jadwal tepat waktu.
- g. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah. Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% menghasilkan 1 dokumen yaitu Dokumen perencanaan anggaran belanja daerah yang tersusu, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.149.024.500,- dari pagu Rp.193.460.000,- yaitu mencapai 77.03%.

Penghambat : Keuangan menunggu APBD, Keuangan menunggu perubahan APBD, dan pergeseran belanja pemeliharaan SIMDA.

Cara Mengatasi : Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan dan Menyesuaikan dengan jadwal evaluasi provinsi.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.
- Ketersediaan UP pada Bendahara Pengeluaran.

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Pada kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 213.163.565.550,- dari pagu Rp.214.670.401.700,- yaitu mencapai 99.30%.

Indikator kegiatan ini adalah Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu dan Persentase Perangkat Daerah dengan Penyaluran Belanja Daerah yang Baik.

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Output nya menghasilkan 372 (SPD) yaitu Penerbitan anggaran kas, Penyiapan pelaksanaan pengendalian anggaran kas dan SPD, Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 101.222.400,- dari pagu Rp. 214.321.200,- yaitu mencapai 47.23%.

Faktor Penghambat: Jaringan yang kurang stabil sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan, Bendahara SKPD yang masih ada kesalahan dalam mengisi template gaji atau hitungan dalam RAK

Cara mengatasi :

- Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan.
- Memberikan ceklist pada berkas yang diserahkan oleh Bendahara SKPD

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antara Staf Subbid Pengendalian Anggaran dan Bendahara, Subbag Perencanaan dan atau Subbag Keuangan dari SKPD
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

- b. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Output nya 277 Desa Kabupaten Banjar, Sedangkan realisasi anggaran

sebesar Rp. 213.941.160.600,- dari pagu Rp. 214.062.550.100,- yaitu mencapai 99.94%.

Faktor Penghambat : keterlambatan penyampaian data dari DPMD

Cara mengatasi : Selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait agar tidak terjadi keterlambatan

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antara Bidang Perbendaharaan dan DPMD
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Output nya 72 laporan yaitu Koordinasi pelaksanaan pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran pihak ketiga, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.729.000,- dari pagu Rp.38.964.400,- yaitu mencapai 42.93%.

Faktor Penghambat : Jaringan yang kurang stabil sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan,

Cara mengatasi : Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan dan Memberikan ceklist pada berkas yang diserahkan oleh Bendahara SKPD

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik dengan SKPD (Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran)

- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

d. **Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 93 SKPD yaitu Aktivitasnya Pengelolaan dan pelaporan pengesahan pendapatan dan belanja daerah, Peningkatan pelaksanaan perbendaharaan daerah, Peningkatan pelaksanaan system informasi elektronik pengelolaan daerah sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 275.389.300,- dari pagu Rp. 354.566.000,- yaitu mencapai 77.67%.

Faktor Penghambat : Jaringan yang kurang stabil sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan,

Cara mengatasi : Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan dan Memberikan ceklist pada berkas yang diserahkan oleh Bendahara SKPD

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik dengan SKPD (Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran) Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

3. **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Pada kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 712.196.000,- dari pagu Rp. 761.020.900,- yaitu mencapai 93.58%.

Indikator kegiatan Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan

ketentuan dan Persentase Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan Kategori Baik.

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

- a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Realisasi Kinerja mencapai mencapai 100% Outputnya 18 laporan yaitu Laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 153.488.600,- dari pagu Rp.153.551.000,- yaitu mencapai 99.96%.

Faktor Penghambat : Keterlambatan pengumpulan data dari SKPD

Cara Mengatasi : Saling berkoordinasi dengan SKPD terkait pengumpulan data

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Seluruh SKPD Dilingkungan Pemkab Banjar dan Tim Rekon Pendapatan dan Tim Rekon Belanja.

- b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi Kinerja mencapai mencapai 100%, Outputnya 2 dokumen yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited dan Audite. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 159.517.800,- dari pagu Rp.159.532.800,- yaitu mencapai 99.99%.

Faktor Penghambat : Keterlambatan pengumpulan data dari SKPD

Cara Mengatasi : Saling berkoordinasi dengan SKPD terkait pengumpulan data

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.
- Seluruh SKPD Dilingkungan Pemkab Banjar

c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Realisasi Kinerja mencapai mencapai 100% Outputnya 2 produk hukum daerah yaitu RAPERDA dan RAPERBUP pertanggungjawaban, pelaksanaan APBD. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 197.422.600,- dari pagu Rp.200.063.700,- yaitu mencapai 98.68%.

Penghambat : Menunggu evaluasi provinsi terhadap RAPERDA dan RAPERBUP pertanggungjawaban

Cara Mengatasi : Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan dan Menyesuaikan dengan jadwal evaluasi provinsi.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.
- Pada perubahan APBD 2022 kegiatan ini di geser sebesar 7.800.000,- Untuk kegiatan Pembinaan Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota.

d. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Realisasi Kinerja mencapai mencapai 100% Outputnya 1 produk hukum yaitu Peraturan Bupati tentang perubahan kebijakan akuntansi. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 113.767.200,- dari pagu Rp.116.457.200,- yaitu mencapai 97.69%.

Penghambat : Proses tanda tangan di level pejabat berwenang sedikit terlambat karena jadwal kegiatan yang padat.

Cara Mengatasi : Koordinasi terhadap pejabat berwenang

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.
- Sesuai Peraturan Presiden 12 Tahun 2019 kegiatan penyusunan Kebijakan, SAKD, BAS.

e. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Realisasi Kinerja mencapai mencapai 100% Outputnya 45 Orang yaitu Semua Kasubbag Keuangan. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 87.999.800,- dari pagu Rp.131.416.200,- yaitu mencapai 66.96%.

Penghambat : Kurang nya pemahaman terkait laporan keuangan akuntansi

Cara Mengatasi : Menjelaskan secara detail dan rinci agar mudah dipahami untuk Kasubbag Keuangan

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.
- Aplikasi Simda FMIS.

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.724.660.447,- dari pagu Rp. 9.218.112.676,- yaitu mencapai 62.10%. Indikator kegiatan Persentase penyelesaian SPP dan SPM yang diajukan oleh Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan indikator sub kegiatan Persentase penyelesaian SPM BTT yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

Penghambat :

- Usulan dari SKPD tidak lengkap atau kurang lengkap
- Lambatnya tindak lanjut dari SEKDA
- Adanya perbedaan asumsi dalam bahasa pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, sehingga ada beberapa usulan dari SKPD yang mengalami penundaan menunggu proses perubahan Perbup tersebut

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

- Kerjasama yang baik antara BPKPAD dan BPBD atau Dinas Pengusul, serta Bagian Hukum dalam pengesahan Surat Keputusan Bupatinya sebagai payung hukum dalam pelaksanaan.

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Pada kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 54 SKPD yaitu Semua Bendahara Gaji Pemerintah Kabupaten Banjar. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.841.100,- dari pagu Rp. 70.000.000,- yaitu mencapai 98.34%. Indikator kegiatan Persentase penyelesaian SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan indikator sub kegiatan Persentase SKPD yang menggunakan aplikasi DAGO (Daftar Gaji Online).

Penghambat :

- Adanya gangguan Jaringan sehingga terhambat untuk membuka aplikasi

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.
- Kerjasama yang baik dengan SKPD (Bendahara Gaji).

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2022 dapat mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 693.063.728,- dari pagu Rp. 706.321.600,-. Dan realisasi fisik mencapai 100%. Indikator program ini adalah Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

sesuai dengan ketentuan dan Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib.

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ada 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

a. Penyusunan Standar Harga

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 1 dokumen yaitu Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.233.000,- dari pagu Rp.75.238.000,- yaitu mencapai 99.99%.

Faktor Penghambat : Ketidaksesuai standar harga yang sudah ditentukan dengan harga pasar

Cara Mengatasi : Menginformasikan terkait standar harga yang tidak sesuai dengan harga pasar

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Anggaran tersedia di dalam Rencana Anggaran Kas.

b. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 2 dokumen yaitu Dokumen Laporan Keuangan Unaudited dan Audited .Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.177.649.728,- dari pagu Rp.181.337.600,- yaitu mencapai 97.97%.

Faktor Penghambat : Keterlambatan pengumpulan data BMD dari SKPD

Cara Mengatasi : Berkoordinasi dengan SKPD terkait

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.

- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.
- SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai

c. Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 1 laporan yaitu Dokumen Sensus, Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.223.000,- dari pagu Rp. 64.223.000,- yaitu mencapai 100%.

Faktor Penghambat : Keterlambatan sensus BMD ke SKPD

Cara Mengatasi : Membuat jadwal sensus BMD ke SKPD

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

d. Pengamanan Barang Milik Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 1 Laporan yaitu .Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.812.000,- dari pagu Rp. 40.817.000,- yaitu mencapai 99.99%.

Faktor Penghambat : Kurang pengawasan terhadap BMD

Cara Mengatasi : Selalu mengawasi BMD Kabupaten Banjar dengan memasang nama dilokasi tanah PEMDA.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

e. Penilaian Barang Milik Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 4 laporan. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.102.348.000,- dari pagu Rp.103.218.000,- yaitu mencapai 99.16%.

Faktor Penghambat : Kurang nya pengetahuan untuk menilai BMD

Cara Mengatasi : Saling berkoordinasi dengan SKPD

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

f. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 15 dokumen pada DPA murni sedangkan pada DPA perubahan menjadi 25 dokumen. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.86.648.000,- dari pagu Rp.93.163.000,- yaitu mencapai 93.01%.

Faktor Penghambat : Kurang nya pengetahuan tentang optimalisasi BMD

Cara Mengatasi : Saling berkoordinasi dengan pimpinan

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

g. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 1 laporan yaitu Laporan Rekonsiliasi SKPD. Sedangkan realisasi

anggaran sebesar Rp. 80.902.000,- dari pagu Rp. 80.952.000,- yaitu mencapai 99.94%.

Faktor Penghambat : Tidak terjadwal dalam melakukan rekonsiliasi BMD

Cara Mengatasi : Membuat jadwal rekonsiliasi SKPD untuk laporan penyusunan BMD

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 dapat mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 1.537.199.380,- dari pagu Rp. 1.576.769.751,-. Dan realisasi fisik mencapai 98.93%. Indikator program ini adalah Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ada 1 kegiatan dengan 2 indikator kegiatan, yaitu “Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah” dan “Persentase peningkatan wajib pajak yang patuh”. Kegiatan tersebut memiliki 14 sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 2 dokumen yaitu Dokumen murni 2022 dan perubahan 2023. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.828.000,- dari pagu Rp. 9.967.000,- yaitu mencapai 98.61%.

Faktor Penghambat : Terkendalanya Proses menyusun rincian pada dokumen target

Cara Mengatasi : Saling berkoordinasi dengan pimpinan untuk penyusunan target

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Rata-rata realisasi sudah mencapai 100%

b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 2 dokumen yaitu Dokumen PERDA dan RAPERDA. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.507.500,- dari pagu Rp.8.585.900,- yaitu mencapai 99.09%.

Faktor Penghambat : Keterlambatan peraturan perundang - undangan

Cara Mengatasi : Saling berkoordinasi dengan pimpinan

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Terlaksananya koordinasi penyusunan draft PDRD dengan baik.

c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 8 laporan yaitu Sosialisasi pajak reklame, Sosialisasi pajak restoran, Sosialisasi pajak sarang burung wallet. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.146.200,- dari pagu Rp.57.327.500,- yaitu mencapai 97.94%.

Faktor Penghambat : Beberapa wajib pajak masih kurang aktif dalam kegiatan sosialisasi.

Cara Mengatasi : Menginformasikan ke wajib pajak untuk menghadiri kegiatan sosialisasi

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
 - Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
 - Terlaksananya kegiatan sosialisasi dengan baik.
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 1 unit yaitu Mesin antri .Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.250.000,- dari pagu Rp.28.086.500,- yaitu mencapai 97.02%.
- Faktor Penghambat** : Tidak tersedianya mesin antri
- Cara Mengatasi** : Meanggarkan mesin antri
- Faktor Pendorong** : Tersedianya anggaran yang cukup untuk membeli mesin antri
- e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 163.64% Outputnya 11 laporan tetapi sub kegiatan ini melebihi target menjadi 18 laporan yaitu LHK koordinasi, HJK MBLB November, LHK pemutahiran PBB-P2 Oktober, LHK pemutahiran PBB-P2 September, LHK pendataan air tanah maret, LHK Hotel Resto maret, LHK Hotel Resto Agustus, LHK MBLB Desember, LHK PBB-P2 November, LHK Verifikasi/validasi Agustus, WP air tanah, WP hiburan, WP hotel, WP MBLB, WP Parkir, WP PBB-P2, WP Reklame, WP Resto dan WP sarang wallet .Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.344.200,- dari pagu Rp. 94.344.200,- yaitu mencapai 100%.
- Faktor Penghambat** : Sulitnya menghubungi WP PBB-P2 dikarenakan alamat kepemilikan atas objek pajak sering kali tidak sesuai dengan SPPT.
- Cara Mengatasi** : Saling berkoordinasi dengan objek pajak
- Faktor Pendorong** :
- Integrasi data antara BPN dan BPKPAD Kab Banjar dapat dilaksanakan beriringan dengan perubahan MoU

- Dukungan dari pihak kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kegiatan updating data.
- f. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 4 laporan yaitu Laporan Triwulanan I - Triwulanan IV. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.703.700,- dari pagu Rp. 21.703.800,- yaitu mencapai 90.78%.

Faktor Penghambat : Keterlambatan membuat laporan Triwulanan I - Triwulanan IV

Cara Mengatasi : Membuat Laporan Triwulanan I - Triwulanan IV tepat waktu

Faktor Pendorong :

- Tersedianya anggaran dan koordinasi dengan pihak terkait.
- g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 106.16% Outputnya 8300 objek pajak tetapi sub kegiatan ini melebihi target menjadi 8811 objek pajak .Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 105.693.500,- dari pagu Rp. 106.687.000,- yaitu mencapai 99.07%.

Faktor Penghambat :

- Masih belum ada harga referensi untuk wilayah Kabupaten Banjar
- Sering terjadi permohonan restitusi atas pembayaran BPHTB karena batal transaksi
- Pembenahan administrasi atas perubahan nomenklatur dan organisasi SKPD
- Data wajib pajak masih data lama (KPP Pratama)
- Wajib pajak banyak yang tidak berdomilisi di tempat objek pajak berada.

Cara Mengatasi : Saling berkoordinasi dengan pimpinan dan Wajib pajak

Faktor Pendorong :

- Aplikasi E-BPHTB
- Terjalinkan kerjasama host to host antara BPKPAD dengan Bank Kalsel
- Integrasi dengan Badan Pertanahan Nasional
- Dukungan Notaris/PPAT
- Aplikasi SISMIOP untuk penerimaan sector pajak PBB-P2
- Terjalinkan kerjasama host to host antara BPKPAD dengan Bank Kalsel dan PT. Pos

h. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 3 Dokumen yaitu Ketetapan pajak air tanah, Ketetapan pajak air reklame dan Ketetapan PBB-P2, .Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.028.000,- dari pagu Rp.14.028.000,- yaitu mencapai 100%.

Faktor Penghambat :

- Terbatasnya personil pemeriksa validasi HKPD yang telah terhimpun per Desember 2022, sehingga finalisasi laporan HKPD per Desember belum dilaksanakan
- Adanya beberapa perubahan pelaku usaha yang tidak melaporkan kegiatan usaha sehingga masih tercatat sebagai wajib pajak lama

Cara Mengatasi : Saling berkoordinasi dengan pimpinan dan Wajib pajak

Faktor Pendorong :

- Kegiatan rekonsiliasi per minggu membantu dalam meningkatkan validitas data wajib pajak yang dihimpun dari aplikasi penerimaan pendapatan dan objek pajak

- Peluncuran inovasi pendaftaran dan pelaporan omset bagi wajib pajak secara online guna mengatasi keterbatasan personil

i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 3168 layanan. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.224.100,- dari pagu Rp.10.224.100,- yaitu mencapai 100%.

Faktor Penghambat :

- Pembenahan administrasi atas perubahan nomenklatur dan organisasi SKPD
- Belum terselesaikannya website BPKPAD dari perubahan Bapenda

Cara Mengatasi : Saling berkoordinasi dengan pimpinan

Faktor Pendorong :

- Telah terintegrasinya aplikasi pada penerimaan pendapatan dari 9 Objek Pajak
- Aplikasi SISMIOP untuk penerimaan sektor pajak PBB-P2 dan BPHTB

j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 16 dokumen yaitu Laporan Triwulanan I - IV dan Laporan Januari - Desember. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.222.800,- dari pagu Rp.61.225.600,- yaitu mencapai 100%.

Faktor Penghambat :

- Terlambatnya SKPD melaporkan ke BPKPAD terkait laporan pendapatan SKPD Retribusi Daerah

Cara Mengatasi : Saling berkoordinasi dengan SKPD terkait

Faktor Pendorong :

- BPKPAD mengadakan Rapat Rekonsiliasi setiap triwulan dengan SKPD terkait

k. Penagihan Pajak Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 11 dokumen yaitu MBLB resto, Hotel, Sarang burung wallet, PBB, BPHTB, Parkir, Reklame, Hiburan, Penerangan jalan dan Air tanah. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.001.487.600,- dari pagu Rp. 1.025.685.371,- yaitu mencapai 97.64%.

Faktor Penghambat :

Double data (Data terlapis) 1 (satu) objek pajak ada 3 (tiga) SPPT

Cara Mengatasi : Saling berkoordinasi dengan pimpinan dan wajib pajak

Faktor Pendorong :

Adanya dukungan dari pihak kecamatan dan kelurahan masing2 wilayah sehingga memudahkan para petugas BPKPAD untuk melakukan penagihan

1. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 120 dokumen yaitu Laporan Penyelesain Pajak Daerah. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.574.400,- dari pagu Rp. 6.574.400,- yaitu mencapai 100%.

Faktor Penghambat :

Objek pajak PBB yang mana wajib pajak usaha/pensiunan keberatan dengan nilai piutang tagihan mereka

Cara Mengatasi : Saling berkoordinasi dengan Wajib pajak

Faktor Pendorong :

Koordinasi Tim dengan pihak terkait

m. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 160 laporan yaitu Banyak nya Wajib Pajak yang membayar. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.347.880,- dari pagu Rp. 94.007.880,- yaitu mencapai 89.72%.

Faktor Penghambat :

Kondisi lapangan/wilayah kabupaten banjar yang luas (diluar jangkauan) dan tidak adanya personil pemeriksa/ juru sita yang terlatih

Cara Mengatasi : Membuat jadwal secara berkala untuk mengecek ke lapangan

Faktor Pendorong :

Adanya dukungan dari pihak kecamatan dan kelurahan masing2 wilayah sehingga memudahkan para petugas BPKPAD untuk melakukan penagihan

n. **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah**

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100% Outputnya 4 laporan yaitu Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah Triwulanan I - IV .Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.841.500,- dari pagu Rp. 38.322.500,- yaitu mencapai 98.74%.

Faktor Penghambat :

Masih adanya keterlambatan dalam pengiriman data retribusi

Cara Mengatasi : Saling berkoordinasi dengan ekspedisi pengiriman

Faktor Pendorong :

Terlaksananya rapat rekonsiliasi dengan baik

4. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 dapat mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 38.464.716.383,- dari pagu Rp. 45.507.003.661,-. Dan realisasi fisik dapat mencapai 101.96%.

Keberhasilan ini diperoleh karena kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin yang sudah biasa dianggarkan setiap tahun sehingga bisa ditakar dengan jelas kebutuhannya.

B.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Triwulan I

Tabel 3.8

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis

Realisasi Capaian Kinerja Bidang Anggaran BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw I	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	113.877.000	97.362.000	30%
	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	113.877.000	97.362.000	30%
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw I	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	5.292.423.900	1.883.576.900	15.25%
	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	222.423.900	35.456.900	34.37%
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.000.000.000	1.831.790.000	4%
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	17.307.800	16.330.000	7,4%
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Akuntansi BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw I	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	177.889.100	20.627.700	10%
	Persentase Perangkat	Koordinasi dan Pelaksanaan	177.889.100	20.627.700	10%

	Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Aset BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw I	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	296.998.000	53.119.250	12%
	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik dan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	296.998.000	53.119.250	12%
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Pendapatan BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw I	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Aset BPKPAD Kab. Banjar	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	745.942.185	497.616.200	11.25%
	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah dan Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah Yang Patuh	Pengelolaan Pendapatan Daerah	745.942.185	497.616.200	11.25%

Sumber : Laporan Triwulan I TA. 2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

B.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Triwulan II

Tabel 3.9

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis

Realisasi Capaian Kinerja Bidang Anggaran BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw II	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	1.669.191.000	339.124.500	28.57%
	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.669.191.000	339.124.500	28.57%
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw II	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	219.826.095.300	163.353.136.380	38.66%
	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	214.756.095.300	161.374.380.280	88.30%
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.000.000.000	1.946.430.000	8%
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	70.000.000	32.326.100	20%
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Akuntansi BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw II	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	674.991.800	200.636.400	17.5%
	Persentase Perangkat	Koordinasi dan Pelaksanaan	674.991.800	200.636.400	17.5%

	Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Aset BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw II	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	582.801.600	299.997.798	31.70%
	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik dan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	582.801.600	299.997.798	31.70%
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Pendapatan BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw II	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Aset BPKPAD Kab. Banjar	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.395.237.571	801.869.900	52.25%
	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah dan Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah Yang Patuh	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.395.237.571	801.869.900	52.25%

Sumber : Laporan Triwulan II TA.2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

B.4 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Triwulan III

Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis

Realisasi Capaian Kinerja Bidang Anggaran BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw III	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	226.339.126.276	659.683.000	28.57%
	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	226.339.126.276	659.683.000	28.57%
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw III	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	214.276.871.300	172.010.175.720	87.40%
	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	214.321.200	59.142.000	74.73%
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.000.000.000	1.831.790.000	100%
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	9.218.112.676	3.769.605.007	75.39%
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Akuntansi BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw III	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	761.020.900	420.710.400	40.66%
	Persentase Perangkat Daerah yang	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	761.020.900	420.710.400	40.66%

	Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	Pelaporan Keuangan Daerah			
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Aset BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw III	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	704.196.600	369.030.088	12%
	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik dan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	704.196.600	369.030.088	12%
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Pendapatan BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw III	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Aset BPKPAD Kab. Banjar	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.576.769.751	964.921.100	82.78%
	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah dan Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah Yang Patuh	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.576.769.751	964.921.100	82.78%

Sumber : Laporan Triwulan III TA. 2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

B.5 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Triwulan IV

Tabel 3.11

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis

Realisasi Capaian Kinerja Bidang Anggaran BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	1.619.591.000	1.443.373.800	100%
	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.619.591.000	1.443.373.800	100%
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	223.958.514.376	220.128.002.847	98.30%
	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	214.670.401.700	214.334.501.300	100%
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.218.112.676	5.724.660.447	100%
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	70.000.000	68.841.100	100%
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Akuntansi BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	761.020.900	420.710.400	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	761.020.900	420.710.400	100%

Realisasi Capaian Kinerja Bidang Aset BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	704.196.600	693.063.728	107.23%
	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik dan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	704.196.600	693.063.728	107.23%
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Pendapatan BPKPAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Aset BPKPAD Kab. Banjar	IPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.576.769.751	1.537.22.180	106.33%
	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah dan Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah Yang Patuh	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.576.769.751	1.537.22.180	106.33%

Sumber : Laporan Triwulan IV TA. 2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pencapaian anggaran yang dikelola BPKPAD Kab. Banjar tahun 2022 yang meliputi realisasi belanja langsung utama dan belanja langsung pendukung adalah Rp. 262.978.552.138,- dari total pagu Rp.274.127.096.288,- sehingga memperoleh nilai serapan sebesar 95,93%.

Realisasi anggaran belanja langsung untuk sasaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1. Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik berhasil direalisasikan sebesar Rp. 1.443.373.800,- dari total pagu Rp. 1.619.591.000,- sehingga memperoleh nilai serapan sebesar 89,12%.
2. Sasaran Persentase Perangkat Daerah dengan Penyerapan Belanja Daerah yang Baik berhasil direalisasikan sebesar Rp. 214.334.501.300,- dari total pagu Rp. 214.670.401.700,- sehingga memperoleh nilai serapan sebesar 99,84%.
3. Sasaran Persentase Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan Kategori Baik berhasil direalisasikan sebesar Rp. 712.196.000,- dari total pagu Rp. 761.020.900,- sehingga memperoleh nilai serapan sebesar 93,58%.
4. Sasaran Persentase penyelesaian SPP dan SPM yang diajukan oleh PD berhasil direalisasikan sebesar Rp. 5.724.660.447,- dari total pagu Rp. 9.218.112.676,- sehingga memperoleh nilai serapan sebesar 62,10%.
5. Sasaran Persentase penyelesaian SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 68.841.100,- dari total pagu Rp. 70.000.000,- sehingga memperoleh nilai serapan sebesar 98,34%.

Realisasi anggaran belanja langsung untuk sasaran Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja langsung untuk sasaran Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, “Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan” berhasil direalisasikan sebesar Rp. 693.063.728,- dari total pagu Rp. 704.196.600,- sehingga memperoleh nilai serapan sebesar 98,42%.

Realisasi anggaran belanja langsung untuk sasaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja langsung untuk sasaran Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 1.312.909.580,- dari total pagu Rp. 1.351.486.451,- sehingga memperoleh nilai serapan sebesar 97,16%.
2. Realisasi anggaran belanja langsung untuk sasaran Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh berhasil direalisasikan sebesar Rp. 224.289.800,- dari total pagu Rp. 225.283.300,- sehingga memperoleh nilai serapan sebesar 99,55%.

Tabel 3.12

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	93.03	95.29	102.43%	Rp	227.043.322.876	222.976.636.375	98.21%
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	– Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	%	87.03	85.40	98.13%	Rp	1.619.591.000	1.443.373.800	89.12%
	– Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	%	96.29	100	103.85%	Rp	214.670.401.700	214.334.501.300	99.84%
	– Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	%	83.33	100	120.00%	Rp	761.020.900	712.196.000	93.58%
Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	%	100	100	100%	Rp	1.619.591.000	1.443.373.800	89.12%
Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dok	2	2	100%	Rp	121.170.300	110.980.300	91.59%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dok	2	2	100%	Rp	113.829.700	102.497.200	90.04%
Terverifikasinya RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dok	2	2	100%	Rp	140.000.000	122.938.000	87.81%
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dok	3	3	100%	Rp	427.300.000	399.283.800	93.44%
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dok	3	3	100%	Rp	350.700.000	317.095.000	90.42%
Tersusunnya Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dok	3	3	100%	Rp	273.131.000	241.555.000	88.44%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dok	2	2	100%	Rp	193.460.000	149.024.500	77.03%
Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	%	100	100	100%	Rp	214.670.401.700	214.334.501.300	99.84%
Tersusunnya Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dok	376	376	100%	Rp	214.321.200	101.222.400	47.23%
Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dok	277	277	100%	Rp	214.062.550.100	213.941.160.600	99.94%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transfer Lainnya									
Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Lap	72	72	100%	Rp	38.964.400	16.729.000	42.93%
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	47	100%	Rp	354.566.000	275.389.300	77.67%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersusunnya Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Lap	12	12	100%	Rp	9.218.112.676	5.724.660.447	62.10%
Tersusunnya Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dok	54	54	100%	Rp	70.000.000	68.841.100	98.34%
Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Rp	761.020.900	712.196.000	93.58%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	18	18	100%	Rp	153.551.000	153.488.600	99.96%
Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Lap	2	2	100%	Rp	159.532.800	159.517.800	99.99%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	2	2	100%	Rp	200.063.700	197.422.600	98.68%
Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dok	1	1	100%	Rp	116.457.200	113.767.200	97.69%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akuntansi Pemerintah Daerah									
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	45	45	100%	Rp	131.416.200	87.999.800	66.96%
Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	%	85.18	95.74	112.40%	Rp	704.196.600	693.063.728	98.42%
Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	%	93.25	100	107.23%	Rp	704.196.600	693.063.728	98.42%
Tersusunnya Dokumen Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dok	1	1	100%	Rp	75.238.000	75.233.000	99.99%
Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dok	1	1	100%	Rp	65.248.000	65.248.000	100%
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lap	3	3	100%	Rp	181.337.600	177.649.728	97.97%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersusunnya Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%	Rp	64.223.000	64.223.000	100%
Tersusunnya Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%	Rp	40.817.000	40.812.000	99.99%
Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Lap	4	4	100%	Rp	103.218.000	102.348.000	99.16%
Tersusunnya Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	25	25	100%	Rp	93.163.000	86.648.000	93.01%
Tersusunnya Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%	Rp	80.952.000	80.902.000	99.94%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	4	8.29	207.25%	Rp	1.576.769.751	1.537.199.380	97.49%
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	94	93	98.93%	Rp	1.576.769.751	1.537.199.380	97.49%
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	%	4	13.56	339%	Rp	1.576.769.751	1.537.199.380	97.49%
	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	%	70	78.13	111.61%				
Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dok	2	2	100%	Rp	9.967.000	9.828.000	98.61%
Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	2	2	100%	Rp	8.585.900	8.507.500	99.09%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Lap	8	8	100%	Rp	57.327.500	56.146.200	97.94%
Tersediannya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1	1	100%	Rp	28.086.500	27.250.000	97.02%
Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Lap	11	18	163,64%	Rp	94.344.200	94.344.200	100%
Tersusunnya Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lap	4	4	100%	Rp	21.703.800	19.703.700	90.78%
Terfasilitasnya Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	8300	8811	106,16%	Rp	106.687.000	105.693.500	99.07%
Tersusunnya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dok	3	3	100%	Rp	14.028.000	14.028.000	100%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	3168	3168	100%	Rp	10.224.100	10.224.100	100%
Terverifikasinya Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dok	16	16	100%	Rp	61.225.600	61.225.600	100%
Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dok	11	11	100%	Rp	1.025.685.371	1.001.487.600	97.64%
Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dok	120	120	100%	Rp	6.574.400	6.574.400	100%
Tersusunnya Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dok	160	160	100%	Rp	94.007.880	84.347.880	89.72%
Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lap	4	4	100%	Rp	38.322.500	37.841.500	98.74%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Σ (unsur kinerja utama x 40%)+(unsur kepatuhan x 30%)+(unsur pelayanan umum x 30%)	%	100	92,57	132,24%	Rp	45.507.003.661	38.464.716.383	84.52%
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Rp	77.702.893	76.509.900	98.46%
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	9	100%	Rp	18.880.088	18.879.900	100%
Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%	Rp	11.424.000	11.404.000	99.82%
Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%	Rp	8.084.200	7.555.200	93.46%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100%	Rp	13.128.900	12.844.700	97.84%
Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100%	Rp	7.084.900	7.084.900	100%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100%	Rp	8.548.300	8.547.100	99.99%
Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	19	100%	Rp	10.552.505	10.194.100	96.600%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Rp	40.363.839.532	33.970.030.837	84.16%
Terfasilitasnya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1008	1008	100%	Rp	39.955.767.099	33.570.308.987	84.02%
Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100%	Rp	384.318.133	375.971.000	97.83%
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Laporan	2	2	100%	Rp	12.624.300	12.624.000	100%
Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100%	Rp	11.130.000	11.126.850	99.97%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Rp	30.036.800	17.921.200	59.66%
Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	100%	Rp	10.000.000	6.858.000	68.58%
Terfasilitasnya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	2	100%	Rp	20.036.800	11.063.200	55.21%
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Rp	956.421.774	897.424.379	93.83%
Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		Rp	7.292.600	7.211.200	98.88%
Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100%	Rp	178.912.704	174.709.460	97.65%

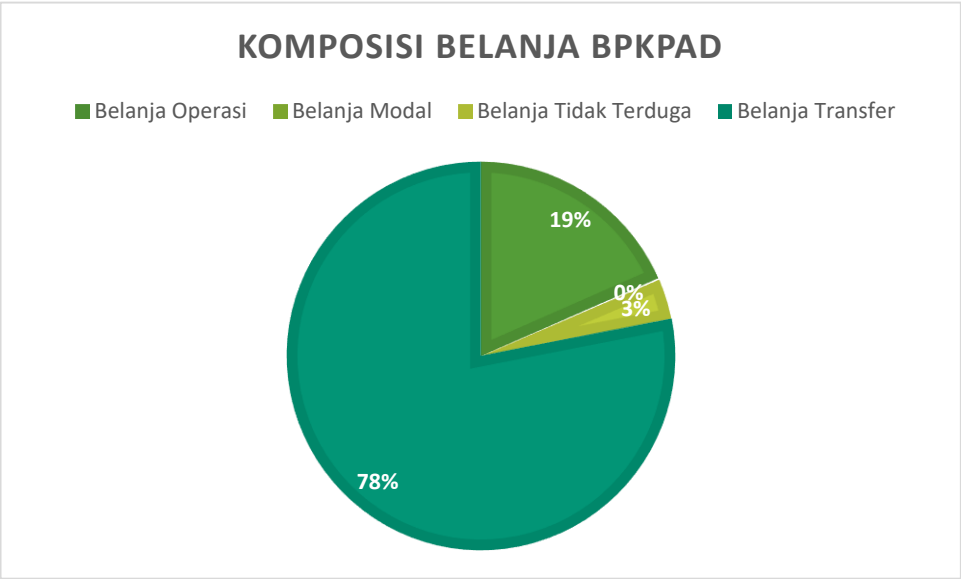
SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	100%	Rp	6.530.300	5.666.000	86.76%
Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	108	108	100%	Rp	11.376.000	9.786.000	86.02%
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%	Rp	752.310.170	700.051.719	93.05%
Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Rp	289.118.400	279.198.728	96.57
Tersedianya Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100%	Rp	50.000.000	48.840.000	97.68%
Tersedianya Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	23	23	100%	Rp	215.257.000	208.267.128	96.75%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	12	100%	Rp	22.903.800	22.091.600	96.45%
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Rp	2.743.844.262	2.329.174.277	84.89%
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	100%	Rp	405.149.332	351.821.774	86.84%
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	13	100%	Rp	2.338.694.930	1.977.352.503	84.55%
Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100%	Rp	1.046.040.000	894.457.062	85.51%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terfasilitasinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%	Rp	79.980.000	57.986.024	72.50%
Terfasilitasinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	67	67	100%	Rp	548.673.000	481.697.838	87.79%
Terfasilitasinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	100%	Rp	31.885.000	19.970.000	62.07%
Terfasilitasinya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100%	Rp	166.692.000	148.350.000	89.00%
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	44	44	100%	Rp	157.970.000	147.401.000	93.31%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dipelihara/ Direhabilitasi									
Terfasilitasnya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3	150%	Rp	60.840.000	39.232.200	64.48%
TOTAL BELANJA						Rp	274.127.096.288	262.978.552.138	95.93%
BELANJA OPERASI						Rp	50.456.191.612	42.914.099.903	85.05%
BELANJA MODAL						Rp	421.549.000	408.447.988	96.89%
BELANJA TIDAK TERDUGA						Rp	9.218.112.676	5.724.660.447	62.10%
BELANJA TRANSFER						Rp	214.031.243.000	213.931.343.800	99.95%

Sumber : LRFK TA. 2022 dan LRA SIMDA TA. 2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar



Sumber : LRFK TA. 2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Banjar

Berdasarkan data dari tabel di atas, hampir semua indikator kinerja kegiatan berhasil dengan nilai capaian 100%.

Pada pos alokasi Belanja Program Utama BPKPAD berjumlah Rp. 228.620.092.627,-. Pada Belanja Program Utama terdapat alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 214.062.550.100,-, dan Dana Darurat berjumlah Rp. 9.218.112.676,-. Sedangkan pada pos alokasi Belanja Program Penunjang BPKPAD berjumlah Rp. 45.507.003.661,-. Yang didalamnya terdapat anggaran BPJS kesehatan ASN se-Kabupaten Banjar berjumlah Rp. 22.000.000.000,-

D. ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya **mencapai atau lebih dari 100%**. Terlihat bahwa dari sasaran yang diampu BPKPAD, “Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat” dan “Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100 dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 95,93% dari total anggaran yang dialokasikan. Semua kegiatan yang ada pada program utama mayoritas capaian kinerjanya mencapai 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber

daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.13

Efisien Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA ($\geq$ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	102.43%	98.21%	1.79%
	– Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	98.13%	89.12%	10.88%
	– Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	103.85%	99.84%	0.16%
	– Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	120.00%	93.58%	6.42%
	– Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	112.40%	98.42	1.58%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	98.13%	89.12%	10.88%
	Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	103.85%	99.84%	0.16%
	Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	120.00%	93.58%	6.42%
Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	100%	89.12%	10.88%
Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100%	91.59%	8.41%
Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100%	90.04%	9.96%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terverifikasinya RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	87.81%	12.19%
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	93.44%	6.56%
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	90.42%	9.58%
Tersusunnya Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	88.44%	11.56%
Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100%	77.03%	22.97%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	100%	99.84%	0.16%
Tersusunnya Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	47.23%	52.77%
Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	99.94%	0.06%
Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	100%	42.93%	57.07%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	77.67%	22.33%
Tersusunnya Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	62.10%	37.90%
Tersusunnya Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%	98.34%	1.66%
Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup)	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan	100%	93.58%	6.42%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA ($\geq$ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan			
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	99.96%	0.04%
Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100%	99.99%	0.01%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	98.68%	1.32%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%	97.69%	2.31%
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	66.96%	33.04%
Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	112.40%	98.42%	1.58%
Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	107.23%	98.42%	1.58%
Tersusunnya Dokumen Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100%	99.99%	0.01%
Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	0.00%
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	97.97%	2.03%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Tersusunnya Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	100%	100%	0.00%
Tersusunnya Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	99.99%	0.01%
Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100%	99.16%	0.84%
Tersusunnya Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	93.01%	6.99%
Tersusunnya Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	99.94%	0.06%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	207.25%	97.49%	2.51%
	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	98.93%	97.49%	2.51%
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	339%	97.49%	2.51%
	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	111.61%		
Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	98.61%	1.39%
Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100%	99.09%	0.91%
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%	97.94%	2.06%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Tersediannya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	97.02%	2.98%
Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	163,64%	100%	0.00%
Tersusunnya Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%	90.78%	9.22%
Terfasilitasinya Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	106,16%	99.07%	0.93%
Tersusunnya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100%	100%	0.00%
Terfasilitasinya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	100%	0.00%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terverifikasinya Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100%	100%	0.00%
Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100%	97.64%	2.36%
Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100%	100%	0.00%
Tersusunnya Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	89.72%	10.28%
Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	98.74%	1.26%
Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Σ (unsur kinerja utama x 40%)+(unsur kepatuhan x 30%)+(unsur pelayanan umum x 30%)	132,24%	84.52%	15.48%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100%	98.46%	1.54%
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	100%	0.00%
Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	99.82%	0.18%
Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	93.46%	6.54%
Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	97.84%	2.16%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	100%	0.00%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	99.99%	0.01%
Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	96.600%	3.40%
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	84.16%	15.84%
Terfasilitasinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	84.02%	15.98%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	100%	97.83%	2.17%
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	0.00%
Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	99.97%	0.03%
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100%	59.66%	40.34%
Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	68.58%	31.42%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA ($\geq$ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terfasilitasinya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	55.21%	44.79
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	93.83%	6.17%
Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	98.88%	1.12%
Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	97.65%	2.35%
Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	86.76%	13.24%
Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	86.02%	13.98%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	93.05%	6.95%
Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	96.57	3.43%
Tersedianya Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	97.68%	2.32%
Tersedianya Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	96.75%	3.25%
Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	96.45%	3.55%
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	84.89%	15.11%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	86.84%	13.16%
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	84.55%	15.45%
Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	85.51%	14.49%
Terfasilitasnya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	72.50%	27.50%
Terfasilitasnya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	87.79%	12.21%
Terfasilitasnya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	62.07%	37.93%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5
Terfasilitasinya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	89.00%	11.00%
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	93.31%	6.69%
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150%	64.48%	35.52%

Sumber : LRFK TA. 2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banja

E. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

E.1 EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja BPKPAD Banjar Tahun 2021 memperoleh nilai evaluasi atas implementasi SAKIP sebesar 76,96 atau predikat “BB” dapat diartikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Sangat Baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Maka pada tahun 2022 direkomendasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemantauan target kinerja yang diperjanjikan sampai level sasaran dan program secara berkala dalam rangka mengukur keberhasilan.
2. Melaksanakan pemantauan/ monitoring terhadap target-target kinerja yang ditetapkan dan melaporkannya pada pihak atau bagian yang bertanggungjawab atas kinerja sesuai dengan jadwal dan mekanisme atau SOP yang ditetapkan.
3. Merumuskan formulasi perhitungan IKU yaitu pada retribusi daerah agar dapat diidentifikasi serta menjelaskan dalam definisi operasional secara keseluruhan.
4. Melaksanakan pengumpulan data (capaian) kinerja berupa laporan periodik kinerja semester dengan data laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dalam rangka pengukuran data (capaian) kinerja agar mengacu pada suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat dan siapa yang melakukan supervise, serta sumber data valid dan dapat diverifikasi).

5. Mendokumentasikan hasil monitoring dan tindak lanjut atas hasil monitoring pencapaian target kinerja eselon III.
6. Menyajikan informasi kinerja yang relevan dan konsisten dalam Laporan Kinerja tahun berikutnya.
7. Menyajikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja outcome atau output penting yang telah diperjanjikan dalam Laporan Kinerja tahun berikutnya.
8. Menyajikan informasi tentang capaian hasil-hasil program, simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan program, analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program, analisis tentang perubahan target grup yang dituju oleh program, ukuran yang memadai tentang keberhasilan program dalam Laporan Kinerja tahun berikutnya.
9. Melaksanakan evaluasi internal secara berkala yang tidak hanya evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran namun juga evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta memberikan rekomendasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
10. Menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang dapat diandalkan.

E.2 TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pemantauan target kinerja yang diperjanjikan sampai pada level sasaran dan program secara berkala dalam rangka mengukur keberhasilan;

pengukuran data (capaian) kinerja dengan mengacu pada suatu mekanisme yang memadai dan terstruktur;



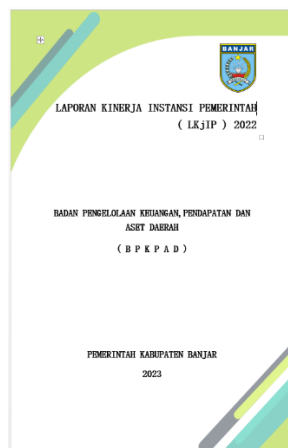
SK Pengumpulan Data, SOP Pengumpulan Data, SOP Monitoring Kinerja, SOP Monitoring Renstra

5. Telah dilaksanakan dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut atas hasil monitoring pencapaian target kinerja eselon III;





6. Telah menyajikan informasi kinerja yang relevan dan konsisten dalam Laporan Kinerja;
7. Telah menyajikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja outcome atau output penting yang telah diperjanjikan dalam Laporan Kinerja;
8. Telah menyajikan informasi tentang capaian hasil-hasil program, simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan program analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program, analisis tentang perubahan target grup yang dituju oleh program, ukuran yang memadai tentang keberhasilan program dalam Laporan Kinerja;



9. Telah dilaksanakan Evaluasi internal secara berkala yang tidak hanya evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran namun juga evaluasi dalam rangka meningkatkan

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan untuk ditingkatkan, sementara itu untuk target-target yang selama ini belum tercapai secara maksimal perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan **“Berhasil”**, (1) Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) dan target 93,09 % . Berdasarkan hasil penilaian Tim Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah didapat nilai indeks 95,29 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik. Untuk Sasaran strategis (2)Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikatorp Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)dengan target meningkat 4 persen dari tahun sebelumnya. Persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 92.82%.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan persentase peningkatan PAD perlu dilakukan perumusan kategori tingkat pencapaiannya. Pada

tabel berikut dibuat beberapa kategori tingkat keberhasilan, sebagai berikut :

Kategori Capaian	Uraian	Keterangan
A	apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 110%;	Sangat Baik
B	apabila 90% < rata2 capaian kinerja< 110%;	Baik
C	apabila 60% < rata2 capaian kinerja < 90%;	Cukup
D	apabila 40% < rata2 capaian kinerja < 60%	Kurang
E	apabila rata2 capaian kinerja < 40%	Buruk

Sumber Data: Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021

Berdasarkan kategori keberhasilan tabel diatas, bahwa capaian PAD dengan persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 92.82%. Nilai ini masuk dalam kategori “B” yaitu “Baik” .

Berdasarkan hasil rekapitulasi target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 dan 2022 data sampai dengan 31 Desember 2022, Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah -5,78%.

	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Peningkatan (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	217.727.181.400	221.010.477.564	205.146.282.499	-5,78 %
Pajak Daerah	80.995.317.631	82.661.526.690	93.727.655.167	15,72 %
Retribusi Daerah	5.921.606.520	6.548.731.174	6.598.693.934	11,43 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.596.447.089	11.480.574.630	716.777.0066	28,08 %
Lain-Lain PAD Yang Sah	125.213.810.160	120.319.645.070	97.652.163.332	-22,01 %

Dari ke empat komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut, hanya 2 komponen yang berada dalam wewenang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 93.727.655.167,- dari target Rp. 82.661.526.690,- dengan peningkatan 15,72%. Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 6.598.693.934,- dari target Rp. 6.548.731.174,- dengan peningkatan 11,43%.

Capaian peningkatan tersebut diatas target yang hanya 4%. Tetapi secara total peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai -5,78%, karena salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lain mengalami penurunan pendapatan, yaitu pada kompoenen Lain-Lain PAD yang Sah. Lain-Lain PAD yang Sah didalamnya adalah perusahaan daerah yang pada kewenangan tidak berada dibawah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sehingga terdapat kesulitan pada intervensi dan koordinasi untuk meningkatkan PAD. Berdasarkan hasil tersebut, komponen Lain-Lain PAD yang Sah sangat mempengaruhi capaian PAD dan nilai peningkatan PAD maka pada tahun 2023 akan dilaksanakan koordinasi dan intervensi secara lebih massif dan konfrehensif agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar dapat tercapai dengan maksimal.

Dari Total Pagu Belanja Langsung yang tersedia sebesar Rp. 274.127.096.288,- dengan realisasi keuangan s.d 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 262.978.552.138,- atau 95.93%, yang berarti anggaran dana terserap secara optimal.

Dari Total Pagu Belanja Langsung tersebut diantaranya terdapat Dana Desa sebesar Rp. 214.062.550.100,- yang berhasil disalurkan sebesar Rp. 213.941.160.600,- atau 99,94% yang berarti dana telah berhasil tersalurkan secara maksimal kepada seluruh desa di Kabupaten Banjar.

Dari Total Pagu Belanja Langsung tersebut juga terdapat Dana Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 9.218.112.676,- yang berhasil disalurkan sebesar Rp. 5.724.660.447,- atau 62.10% yang berarti dana berhasil tersalurkan secara maksimal kepada perangkat daerah pengampu, yang kemudian disalurkan langsung hingga ke masyarakat.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah secara utuh dan terukur. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan pada Tahun Anggaran 2023.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di tahun selanjutnya.

B. SARAN-SARAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Martapura 02 Januari 2023

Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar

Drs. Achmad Zulyadaini, M. Si

NIP. 19660104 198602 1 004